

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORT*  
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Sarjana Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi

**ANDINI NUR APRIYANI**

**NPM : C10160083**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) EKUITAS**

**BANDUNG**

**2020**

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORT*  
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)**

**ANDINI NUR APRIYANI**

**NPM: C10160083**

Bandung, 09 Maret 2020

Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua STIE EKUITAS

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



**Prof. Dr.rer.nat. M. Fani Cahyandito, CSP.    Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA.**

**Tanggung jawab yuridis ada pada penulis**

## PERNYATAAN

### PROGRAM SARJANA

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan nama jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah yang disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak-benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, 09 Maret 2020

(Andini Nur Apriyani)  
NPM: C10160083

**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORT***  
(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia Periode 2016-2018)

**Ditulis Oleh:  
Andini Nur Apriyani**

**Pembimbing:  
Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang diklasifikasikan menjadi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*, baik secara parsial maupun simultan. Objek penelitian ini adalah dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Subjek dalam penelitian ini adalah pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode verifikatif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 47 perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Sampel penelitian terdiri dari 7 perusahaan dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu *purposive judgment sampling*. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Secara simultan mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Kata kunci: dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, pengungkapan *sustainability report*.

***THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)  
MECHANISM TO THE DISCLOSURE OF SUSTAINABILITY REPORT  
(Empirical Study of Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock  
Exchange (IDX) For the Period of 2016-2018)***

***Written By:***  
**Andini Nur Apriyani**

***Preceptor:***  
**Annisa Nurfitriana, SE., M.Si.**

***ABSTRACT***

*The study aims to determine the effect of good corporate governance (GCG) mechanism which are classified into boards of commissioners, boards of directors and audit committees towards the disclosure of sustainability report, either partially or simultaneously. Objects in this study is the boards of commissioners, boards of directors and audit committees. Subject in this study is the disclosure of sustainability report in mining sector company that is listed in Indonesia Stock Exchange the period of 2016-2018.*

*The method used in this study is verification. The population in this study consists of 47 companies which are included in mining sector in Indonesia Stock Exchange during the period of 2016-2018. The sample of study consists of 7 companies by using the sampling technique which is purposive judgment sampling. The data being used are the secondary data. The analysis method used in this research is multiple linear regression analysis.*

*The research's result shows that partially, there are boards of commissioners, boards of directors and audit committees variable affect toward the disclosure of sustainability report. Simultaneously, the good corporate governance (GCG) mechanism affect toward the disclosure of sustainability report.*

***Keywords:*** *boards of commissioners, boards of directors, audit committees, disclosure of sustainability report.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan syukur, penulis memanjatkan puji ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam ditujukan untuk teladan umat, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya yang setia sampai akhir zaman. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)” ini disusun untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang diklasifikasikan menjadi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* secara parsial dan simultan, untuk referensi pada masa yang akan datang sebagai pengembang ilmu dalam lingkup akuntansi khususnya akuntansi keuangan, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana tingkat Strata-1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima bimbingan, bantuan, saran, semangat serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho, berkat, rahmat, kesabaran, ketawakalan, dan limpahan kasih sayang-Nya kepada penulis, serta mendengar setiap doa dari penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Dr. rer.nat. M. Fani Cahyandito, SE., M.Sc., CSP., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.
3. Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. Selaku Wakil Ketua I STIE EKUITAS.
4. Dr. Herry Achmad Buchory, SE., MM. Selaku Wakil Ketua II STIE EKUITAS.
5. Dr. Sudi Rahayu, SE., MM. Selaku Wakil Ketua III STIE EKUITAS.
6. Dwi Puryati, SE., M.Si., Ak., CA, Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE EKUITAS.
7. Hery Syaerul Homan, S.Pd., M.Pd., M.Ak., Selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi STIE EKUITAS dan Selaku Dosen Wali S1 Akuntansi 3 (C) pada STIE EKUITAS.
8. Annisa Nurfitriana, SE., M.Si., Selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta dengan sabar membimbing, memberikan pengarahan, dan selalu memberikan saran yang berarti bagi penulis.
9. Seluruh staf pengajar Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sejak awal semester hingga sekarang.

10. Seluruh staf administrasi, staf perpustakaan, staf PUPD, dan karyawan STIE Ekuitas lainnya yang telah memberikan bantuan serta pelayanan yang baik kepada penulis.
11. Kedua orang tua tersayang, Bapak Moch.Edi Sunaedi dan Ibu Eti Sumiati, serta nenek tercinta Ibu Kartini yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, dukungan baik moril maupun materil, dan arahan, serta menjadi motivator bagi penulis.
12. Adikku tersayang, Ibnu Salas Novansyah yang selalu memberikan *support*, menghibur dan doa serta menjadi penyemangat bagi penulis.
13. Kakak-kakakku tersayang, Luvita, Hanifatunnisa dan Mutia yang selalu memberikan *support* dan membimbing penulis serta menjadi penyemangat bagi penulis.
14. Sahabatku Angghita, Osha, Rifa, Hafiedz, Chika, Citra dan Nufus yang telah setia menemani dan berbagi sampai sekarang.
15. Muhammad Fakhri Fadhila yang selalu memberikan doa, dorongan, masukan dan semangat kepada penulis.
16. Teman-teman terbaik penulis, Yuanita, Ani, Yasintha, Wika, Siti, Karimatu, Ajeng, Euis, Sinta, Yolana, Fumico, Ardi, Mod dan Siti Mas Ajeng, yang tiada hentinya selalu berbagi ilmu, mengingatkan penulis, memberikan dukungan, serta doa sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, terutama para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi penyemangat selama penulis menyusun skripsi ini.

18. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat dipahami oleh kalangan mahasiswa, dosen, perusahaan, maupun peneliti selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Bandung, 09 Maret 2020

Andini Nur Apriyani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Kegunaan Penelitian .....	13
1.5 Waktu dan Tempat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN</b> .....	<b>15</b>
2.1 Tinjauan Pustaka.....	15
2.1.1 <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	15
2.1.1.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG). 15	
2.1.1.2 Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	16
2.1.1.3 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) ...	18
2.1.1.4 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	19
2.1.2 <i>Sustainability Report</i> .....	24
2.1.2.1 Konsep <i>Sustainability Report</i> .....	24
2.1.2.2 Pengertian <i>Sustainability Report</i> .....	26
2.1.2.3 Tujuan Penerbitan <i>Sustainability Report</i> .....	27
2.1.2.4 Manfaat <i>Sustainability Report</i> .....	27
2.1.2.5 Prinsip-Prinsip <i>Sustainability Report</i> .....	29
2.1.2.6 Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .....	30
2.1.2.7 Indikator Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> ...	32
2.1.2.8 Metode Pengukuran <i>Sustainability Report</i> .....	38
2.1.3 Penelitian Terdahulu .....	39
2.2 Kerangka Pemikiran .....	43
2.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .....	46
2.2.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .....	48
2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .....	49
2.2.4 Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> ..	51
2.2.5 Paradigma Penelitian .....	54
2.3 Hipotesis Penelitian .....	55

<b>BAB III</b>	<b>OBJEK PENELITIAN DAN METODOLOGI PENELITIAN ...</b>	<b>56</b>
3.1	Objek Penelitian dan Gambaran Umum Perusahaan.....	56
3.1.1	Objek Penelitian .....	56
3.1.2	Gambaran Umum Perusahaan .....	56
3.1.2.1	Sub-Sektor Batubara.....	57
3.1.2.2	Sub-Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi.....	58
3.1.2.3	Sub-Sektor Logam dan Mineral Lainnya .....	59
3.1.2.4	Sub-Sektor Tanah dan Batu Galian .....	60
3.2	Metode Penelitian .....	61
3.2.1	Metode yang digunakan .....	61
3.2.2	Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	63
3.2.2.1	Variabel Independen.....	63
3.2.2.2	Variabel Dependen .....	64
3.2.3	Populasi dan Teknik Penentuan Sampel .....	66
3.2.4	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data .....	70
3.2.4.1	Jenis dan Sumber Data .....	70
3.2.4.2	Teknik Pengumpulan Data .....	70
3.2.5	Rancangan Pengujian Hipotesis .....	71
3.2.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	72
3.2.5.2	Analisis Statistik Verifikatif .....	72
3.2.5.3	Uji Asumsi Klasik .....	73
3.2.5.4	Analisis Regresi Linear Berganda .....	76
3.2.5.5	Uji Koefisien Korelasi .....	77
3.2.5.6	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	78
3.2.5.7	Pengujian Hipotesis .....	78
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>84</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	84
4.1.1	Deskripsi Umum Penelitian .....	84
4.1.2	Deskripsi Variabel Penelitian.....	85
4.1.2.1	Deskripsi Dewan Komisaris Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.....	85
4.1.2.2	Deskripsi Dewan Direksi Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.....	88
4.1.2.3	Deskripsi Komite Audit Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.....	91
4.1.2.4	Deskripsi Pengungkapan Sustainability Report Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018 .....	93
4.1.3	Analisis Statistik Deskriptif .....	96
4.1.4	Uji Asumsi Klasik .....	98
4.1.4.1	Uji Normalitas .....	98
4.1.4.2	Uji Multikolonieritas .....	101
4.1.4.3	Uji Autokorelasi .....	102
4.1.4.4	Uji Heteroskedastisitas .....	104
4.1.5	Analisis Regresi Linear Berganda.....	105

4.1.6	Pengujian Koefisien Korelasi.....	107
4.1.7	Pengujian Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	108
4.1.8	Pengujian Hipotesis Penelitian.....	109
4.1.8.1	Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	109
4.1.8.2	Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)....	114
4.2	Pembahasan .....	116
4.2.1	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).....	116
4.2.1.1	Dewan Komisaris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	118
4.2.2.2	Dewan Direksi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	119
4.2.2.3	Komite Audit pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	121
4.2.2	Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	122
4.2.3	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) .....	124
4.2.3.1	Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Perusahaan Sektor Pertambangan.....	124
4.2.3.2	Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Perusahaan Sektor Pertambangan .....	127
4.2.3.3	Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Perusahaan Sektor Pertambangan .....	130
4.2.3.4	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan .....	134
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>140</b>
5.1	Kesimpulan .....	140
5.2	Saran .....	140
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 2.2 Paradigma Penelitian.....	54
Gambar 4.1 Grafik Rata-rata Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Sektor .....	87
Gambar 4.2 Grafik Rata-rata Jumlah Anggota Dewan Direksi Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018 .....	90
Gambar 4.3 Grafik Rata-rata Ukuran Komite Audit Perusahaan Sektor .....	92
Gambar 4.4 Grafik Rata-rata <i>Sustainability Report Disclosure Index</i> (SRDI) Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016- 2018.....	95
Gambar 4.5 Hasil P-Plot Uji Normalitas.....	99
Gambar 4.6 Kurva Pengujian Autokorelasi .....	103
Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	104

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indeks Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .....	35
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1 Perusahaan Sub-Sektor Batubara.....	57
Tabel 3.2 Perusahaan Sub-Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi.....	59
Tabel 3.3 Perusahaan Sub-Sektor Logam dan Mineral Lainnya .....	60
Tabel 3.4 Perusahaan Sub-Sektor Tanah dan Batu Galian .....	61
Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian .....	65
Tabel 3.6 Populasi Penelitian.....	67
Tabel 3.7 Seleksi Sampel Penelitian .....	69
Tabel 3.8 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian .....	69
Tabel 3.9 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson .....	75
Tabel 3.10 Interpretasi Koefisien Korelasi .....	78
Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Sektor Pertambangan.....	84
Tabel 4.2 Dewan Komisaris Perusahaan Sektor Pertambangan .....	86
Tabel 4.3 Dewan Direksi Perusahaan Sektor Pertambangan .....	88
Tabel 4.4 Komite Audit Perusahaan Sektor Pertambangan .....	91
Tabel 4.5 Pengungkapan <i>Sustainability Report (Sustainability Report Disclosure Index)</i> Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018.....	94
Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	97
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas .....	100
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas .....	101
Tabel 4.9 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson .....	102
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi .....	103
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	106
Tabel 4.12 Interpretasi Koefisien Korelasi .....	107
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Korelasi .....	108
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	109
Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	110
Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	115
Tabel 4.17 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan.....	125
Tabel 4.18 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan.....	128
Tabel 4.19 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan.....	131
Tabel 4.20 Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan Sektor Pertambangan .....	137

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Populasi Penelitian
Lampiran 2	Tabulasi Data Sampel
Lampiran 3	Hasil Output <i>SPSS</i> 23.0
Lampiran 4	Tabel <i>Durbin-Watson</i>
Lampiran 5	Tabel t
Lampiran 6	Tabel F
Lampiran 7	Lembar Pengajuan Penulisan Skripsi
Lampiran 8	Lembar Perubahan Judul Skripsi
Lampiran 9	SK Bimbingan Skripsi
Lampiran 10	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 11	Lembar Revisi
Lampiran 12	Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan di seluruh negara, baik di negara maju maupun negara berkembang pada umumnya adalah memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam pelaksanaan mencapai tujuan tersebut, perusahaan seringkali mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas atau tindakan ekonomi perusahaan. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan seperti penggunaan sumber daya alam yang kontinyu tanpa ada *recovery* berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, misalnya semakin berkurangnya lahan terbuka, polusi udara, pencemaran air dan perubahan iklim. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, banyak perusahaan yang hanya berorientasi pada maksimalisasi laba untuk menunjukkan kinerjanya dan mengabaikan dampak sosial serta lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat sekitar.

Dalam melaksanakan aktivitas usahanya, perusahaan seringkali kurang memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga hal tersebut mengindikasikan perusahaan tidak melakukan studi kelayakan yang baik terhadap proses, produk atau jasa yang mereka hasilkan. Selain itu, kurangnya kesadaran perusahaan akan dampak lingkungan menyebabkan pengelolaan limbah yang mereka hasilkan dari kegiatan sehari-hari tidak maksimal. Akibatnya, banyak ditemukan limbah yang terbuang begitu saja dan terlihat seperti tanpa ada proses pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Jika hal ini dibiarkan, maka

semakin hari limbah akan semakin menumpuk. Limbah yang menumpuk akan mencemari lingkungan sekitar seperti tanah, sungai, teluk bahkan laut. Lebih dari itu, apabila dampak negatif terhadap lingkungan terjadi secara berkesinambungan, maka akan mengakibatkan ekosistem keanekaragaman hayati terganggu.

Aktivitas merusak lingkungan lainnya dapat berupa penggundulan hutan yang disebabkan oleh penebangan liar maupun kebakaran yang disengaja semata-mata demi kepentingan perusahaan. Hal ini tentu akan menyebabkan ekosistem hayati terganggu dan juga dapat merugikan masyarakat sekitar. Selanjutnya, kerusakan lingkungan dapat pula disebabkan oleh penambangan secara liar tanpa melalui studi kelayakan terlebih dahulu. Penambangan yang dilakukan secara semena-mena dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku tentu akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti perubahan bentang alam, tercemarnya lingkungan di kawasan penambangan merugikan masyarakat sekitar di kawasan area penambangan, bahkan dapat mengakibatkan perubahan temperatur disekitar kawasan penambangan. Area bekas penambangan yang tidak ditanggulangi akan menyebabkan terbentuknya kubangan air yang akan membahayakan masyarakat sekitar.

Dampak lingkungan lainnya yang seringkali terjadi adalah polusi udara, dimana polusi udara ini timbul dari emisi gas hasil aktivitas perusahaan sektor industri. Emisi gas ini menutupi lapisan ozon sehingga dapat meningkatkan temperatur permukaan bumi atau disebut dengan pemanasan global. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya pemanasan global adalah banyaknya penggunaan kaca pada bangunan-bangunan (efek rumah kaca).

Banyak perusahaan di Indonesia, baik di sektor industri, pertambangan maupun sektor lainnya mengabaikan dampak lingkungan karena berfokus pada maksimalisasi laba saja. Meskipun Undang-Undang dan peraturan mengenai lingkungan dan dampak lingkungan telah banyak diterbitkan, tetap saja pelanggaran dalam bentuk aktivitas merusak lingkungan masih banyak dilakukan.

Disamping dampak lingkungan, fokus orientasi laba pun mengakibatkan terjadinya dampak sosial. Dampak sosial berkesinambungan dengan dampak lingkungan karena dampak sosial seringkali timbul akibat terjadinya dampak lingkungan. Polusi udara, pencemaran air, penggundulan hutan serta penambangan liar merupakan contoh sederhana dari kasus dampak lingkungan yang berkesinambungan dengan dampak sosial karena dampak-dampak tersebut dapat merugikan masyarakat sekitar seperti tersebarnya penyakit berbahaya akibat aktivitas perusahaan dan dapat terjadinya bencana alam seperti longsor.

Selain itu, dampak sosial juga dapat terjadi selama aktivitas perusahaan berlangsung seperti terjadinya diskriminasi pekerja, pelanggaran hak asasi manusia, mempekerjakan anak dibawah umur, pelaksanaan kerja paksa, terjadinya kesenjangan sosial, kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, kurangnya perhatian terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, kurangnya perhatian terhadap hak-hak masyarakat lokal sekitar perusahaan serta terjadinya konflik internal maupun eksternal yang belum terkelola dengan baik.

Dampak sosial pun dapat terjadi pasca aktivitas perusahaan tertentu salah satunya perusahaan sektor pertambangan, seperti penurunan tingkat lapangan pekerjaan akibat terbengkalainya kawasan bekas penambangan, serta kurangnya

pembinaan purnabakti pasca aktivitas perusahaan sehingga masyarakat sekitar tidak lagi memiliki mata pencaharian.

Fokus orientasi laba juga mengakibatkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi berkesinambungan dengan dampak lingkungan karena dampak ekonomi seringkali timbul akibat terjadinya dampak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang signifikan dapat menyebabkan timbulnya kerugian pada negara karena lingkungan merupakan kekayaan alam suatu negara. Apabila kekayaan alam suatu negara rusak, maka akan menurunkan tingkat pendapatan negara itu sendiri. Selain itu, dampak ekonomi lainnya dapat berupa persaingan yang tidak sehat antar perusahaan dalam bentuk sengketa, terjadinya praktik monopoli, terjadinya “*fraud*” yaitu memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya serta timbulnya praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang terjadi akibat aktivitas perusahaan merupakan bentuk perwujudan dari “*legitimacy gap*”. *Legitimacy gap* adalah keadaan ketika nilai-nilai yang dianut perusahaan berbeda dengan nilai-nilai masyarakat (Ratnasari, 2011). *Legitimacy gap* akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada laba yang sebesar-besarnya. *Legitimacy gap* juga dapat terjadi akibat dari ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan dengan ekspektasi masyarakat. *Legitimacy gap* dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Apabila operasi perusahaan sesuai dengan harapan

masyarakat, maka akan terjadi kesesuaian pada nilai sosial dan norma masyarakat begitupun sebaliknya.

Banyak fenomena yang terjadi terkait dengan “*legitimacy gap*”. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memperhatikan nilai-nilai masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi, akibatnya perusahaan pun melakukan perilaku-perilaku yang sifatnya merusak. Dalam banyaknya fenomena “*legitimacy gap*”, beberapa diantaranya adalah fenomena terkait dengan perusahaan sektor pertambangan.

Fenomena mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan seperti pencemaran Teluk Kao dan beberapa sungai di Maluku Utara karena operasi tambang emas yang dilakukan oleh PT. Nusa Halmahera Mineral telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kerusakan lingkungan ini telah merugikan masyarakat, dimana selain terjadi pencemaran Teluk Kao dan beberapa sungai, terjadi pula penyebaran penyakit yang diderita oleh belasan warga sekitar. (www.mongabay.co.id, 2014).

Fenomena lain juga terjadi di Bangka Belitung, dimana kerusakan lingkungan terjadi akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simbang Pesak Indokwarsa. Kedua perusahaan tersebut melakukan pertambangan tanpa studi kelayakan sehingga terjadi kerusakan lingkungan di lokasi penambangan hingga areal hutan wilayah perizinan. Kedua perusahaan itu juga melakukan perusakan hutan suaka alam, selain itu, usai dikeruk, bekas galian tersebut dibiarkan begitu saja. Akibatnya struktur bentang alam pada hutan lindung rusak berat.

(www.news.detik.com, 2014).

Fenomena lain pun terjadi di Papua, dimana fenomena ini menyangkut konflik antara para pekerja dengan PT. Freeport Indonesia. Para pekerja menuntut PT. Freeport Indonesia menghentikan program *furlough* dan menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap para pengurus serikat pekerja. Selain itu, perusahaan tersebut diduga melanggar sejumlah aturan ketenagakerjaan. (www.bisnis.tempo.co, 2018).

Fenomena-fenomena tersebut memberikan fakta bahwa dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang tidak memperhatikan nilai-nilai masyarakat dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) adalah salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan dan meyakini bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik dan tepat serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan para pemegang saham. Penerapan GCG dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan perusahaan dan akan memberikan kontribusi serta nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham, pegawai dan *stakeholder* lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) merupakan komitmen utama perusahaan untuk dapat mewujudkan tidak hanya pertumbuhan usaha jangka pendek, tetapi juga untuk keberlangsungan usaha jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan selalu berupaya untuk terus meningkatkan implementasi GCG secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan upaya-upaya perbaikan dalam penerapannya.

Dalam pelaksanaannya, *good corporate governance* (GCG) memiliki mekanismenya sendiri. Mekanisme GCG merupakan suatu prosedur atau hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan GCG harus didukung dengan struktur *corporate governance* yang terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan dewan direksi, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya GCG, seperti sekretaris perusahaan, komite audit dan komite-komite lain yang mendukung pelaksanaan GCG.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) mekanisme GCG, yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Berdasarkan fenomena di atas, mekanisme GCG memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing mekanisme tersebut.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan terkait dengan dampak sosial dan lingkungan serta memberikan nasihat kepada dewan direksi perihal masalah sosial dan lingkungan yang sedang terjadi disertai dengan solusi untuk masalah tersebut. Sedangkan, dewan direksi bertugas mengambil keputusan berdasarkan nasihat dewan komisaris dan analisis lanjutan terkait dengan masalah sosial dan lingkungan yang terjadi guna menyelesaikan masalah tersebut sehingga kelangsungan jangka panjang perusahaan dapat dipastikan. Sementara itu, komite audit bertugas dan bertanggung jawab membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris,

termasuk membantu melaksanakan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi.

Seiring dengan perkembangan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), perusahaan mulai menyadari bahwa pengungkapan laporan perusahaan tidak hanya berpijak pada *single bottom line* tetapi berpijak pada pengungkapan laporan yang lebih komprehensif yaitu *triple bottom line*, yang kemudian disebut dengan *sustainability report*.

Sementara, menurut pemahaman penulis *sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

Pengungkapan *sustainability report* semakin mendapat perhatian dalam praktik bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perusahaan-perusahaan semakin menyadari bahwa pengungkapan laporan yang lebih komprehensif, yaitu berpijak pada *triple bottom line* akan mendukung strategi perusahaan. Selain itu, dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap *sustainable development*. Pengungkapan *sustainability report* juga dapat meningkatkan legitimasi perusahaan.

Meskipun begitu, dalam kenyataannya pengungkapan *sustainability report* di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*, artinya pengungkapan *sustainability report* dilakukan secara sukarela. Hal ini disebabkan

karena kurangnya antusias perusahaan untuk memahami pentingnya peran lingkungan dan sosial yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan serta belum adanya perhatian lebih dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan imbauan kepada tiap perusahaan terkait kontribusi nyata dalam membantu kegiatan pelestarian lingkungan dan sosial di sekitar operasional perusahaan.

Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep GCG yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*-nya sesuai dengan aturan yang ada dan menjamin kerjasama yang aktif dengan *stakeholder*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

Penerapan GCG tidak hanya mendukung upaya perusahaan dalam mencapai tujuannya, namun juga turut memaksimalkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan yang lain. Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, sesuai dengan prinsip GCG yaitu transparansi, perusahaan dituntut untuk dapat mengungkapkan semua informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Informasi keuangan diungkapkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan, sementara informasi non-keuangan berupa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Mekanisme GCG tentu turut serta dalam proses pengungkapan *sustainability report* karena untuk menghasilkan *sustainability report* yang berkualitas, keterlibatan mekanisme GCG sangat diperlukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa mekanisme GCG terdiri dari 3 (tiga) organ utama,

yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan dewan direksi, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya GCG, seperti sekretaris perusahaan, komite audit dan komite-komite lain yang mendukung pelaksanaan GCG.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) mekanisme GCG yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Dalam kaitannya dengan pengungkapan *sustainability report*, mekanisme GCG memiliki pengaruhnya masing-masing. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing mekanisme tersebut.

Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Selain itu, keberadaan dewan komisaris dapat memberikan kontrol dan pengawasan bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sebagai pusat sistem *corporate governance*, dewan direksi memiliki tanggung jawab utama memastikan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan demi terciptanya kelangsungan jangka panjang dari perusahaan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut mencakup juga pengungkapan *sustainability report*. Sementara, komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lain yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral. Selain itu, koordinasi komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, dimana semakin sering

komite audit melaksanakan rapat, maka akan semakin sering para anggota komite audit bertukar pikiran dan pengetahuan mengenai keputusan yang harus diambil demi kepentingan seluruh *stakeholder* dan pengawasan terhadap manajemen menjadi lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan *sustainability report*.

Dengan tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap elemen perusahaan menjadi unsur komitmen dan konsistensi perusahaan untuk selalu peduli bukan hanya pada keuntungan perusahaan, namun juga bagaimana peduli kepada masyarakat dan mampu menjaga dan memelihara lingkungan, dimana informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan diungkapkan dalam *sustainability report*.

Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan karena perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sehingga, perusahaan sektor pertambangan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diungkapkan dalam *sustainability report*. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 yang menyatakan bahwa perseroan yang wajib mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Berdasarkan fenomena, gambaran teori dan penjelasan lainnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pengungkapan *sustainability report*, dimana penelitian ini akan meneliti bagaimana pengaruh

mekanisme *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan yang melakukan pengungkapan *sustainability report*, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini akan dibatasi hanya pada perusahaan sektor pertambangan. Adapun judul yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

**“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Bagaimana pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana di Sekolah Tinggi Ekonomi (STIE) Ekuitas.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, bila dikaitkan dengan rumusan yang telah dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan dasar pengembangan bagi penelitian selanjutnya mengenai topik pengungkapan *sustainability report*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Bagi Investor dan Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para pelaku dunia usaha dan bisnis seperti investor dan perusahaan *go public* sehingga dapat mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### 1.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang di publikasikan melalui situs resmi BEI, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Adapun waktu penelitian dilakukan selama bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**  
**PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 *Good Corporate Governance* (GCG)**

**2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)**

Rusdiyanto (2019:3) menyatakan bahwa *good corporate governance* (tata kelola yang baik) merupakan alat untuk menumbuhkan integritas perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan *stakeholders*. Lebih lanjut Rusdiyanto (2019:106) menyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip GCG.

Sementara menurut Daniri (2014:5), *good corporate governance* (GCG) merupakan struktur dan proses (peraturan, sistem dan prosedur) untuk memastikan prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengacu pada struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk tujuan pengarahan dan pengendalian perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

#### **2.1.1.2 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)**

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 dikutip dalam Rusdiyanto (2019:39), prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) meliputi 5 (lima) aspek, yaitu:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi adalah adanya pengungkapan informasi yang bersifat terbuka, jelas, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. *Independensi (Independency)*

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*

Perusahaan menjamin adanya perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam suatu negara untuk mengevaluasi dan meningkatkan hukum, institusi dan kerangka peraturan untuk *good corporate governance* dan untuk memberikan arahan dan saran untuk pasar modal, investor, perusahaan dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses pengembangan *good corporate governance* (Rusdiyanto, 2019:76).

### **2.1.1.3 Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)**

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 dikutip dalam Rusdiyanto (2019:37), *good corporate governance* (GCG) dilaksanakan dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan.
5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

#### **2.1.1.4 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)**

Mekanisme *good corporate governance* (GCG) merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut (Rusdiyanto, 2019:78).

Mekanisme GCG terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan dewan direksi, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya GCG, seperti sekretaris perusahaan, komite audit dan komite-komite lain yang mendukung pelaksanaan GCG, yang masing-masing telah memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG pada tahun 2006.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) mekanisme GCG yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing mekanisme GCG tersebut.

##### **1. Dewan Komisaris**

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas pokok

dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Nadapdap, 2018:140).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dikutip dalam Nadapdap (2018:141-142), tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi (pasal 108).
- b. Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi (pasal 114 ayat (2)).
- c. Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (pasal 114 ayat (3)).
- d. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih, bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- e. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (pasal 17 ayat (1)).

- f. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (pasal 118 ayat (1)).

## 2. Dewan Direksi

Menurut Nadapdap (2018:109), direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dikutip dalam Nadapdap (2018:126-127), kewajiban direksi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi (pasal 100 ayat (1) huruf a).
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dokumen perusahaan (pasal 100 ayat (1) huruf b).
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan (pasal 100 ayat (1) huruf c).
- d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham,

daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan Salinan risalah RUPS dan Salinan laporan tahunan (pasal 100 ayat (3)).

- e. Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (pasal 101 ayat (1)).
- f. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan huruf a, b, c dan d dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut (pasal 101 ayat (2)).
- g. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
  - 1) Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
  - 2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan; yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

### 3. Komite Audit

Berdasarkan *International Best Practices*, komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pelaporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan pengawasan perusahaan (*corporate control*). Dalam bidang *corporate governance*, komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya

yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral (Sutedi, 2012:162).

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (2019), komite audit merupakan organisasi yang mampu mendorong diterapkannya *good corporate governance* (GCG) di Indonesia. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya (www.komiteaudit.or.id, 2019).

Sementara menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tugas utama komite audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Menurut peraturan tersebut, struktur dan keanggotaan komite audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
- b. Komisaris independen yang akan menjadi ketua komite audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan emiten tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- 2) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada emiten tersebut;
- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama emiten tersebut; dan
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten tersebut.

## **2.1.2 Sustainability Report**

### **2.1.2.1 Konsep Sustainability Report**

Dilansir dalam situs [lingkunganku.com](http://lingkunganku.com) (2010) dijelaskan pengertian dari *sustainability* sebagai berikut:

*“Sustainability is broadly defined as meeting the needs of present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.*

Pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) menurut *United Nations* (dalam *Agenda for Development*) yaitu pembangunan dengan wawasan multidimensional dalam mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi. Pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk mendukung

adanya pembangunan berkelanjutan, *sustainability report* digunakan sebagai salah satu media informasi perusahaan kepada para *stakeholder* (Lako, 2015:128).

Menurut Rusdiyanto (2019:47), *sustainability* didefinisikan sebagai kapasitas suatu ekosistem untuk bertahan dengan memanfaatkan daya dukung yang ada di sekitar. Lebih lanjut, Rusdiyanto (2019:49) menjelaskan bahwa *sustainability* membutuhkan inovasi perusahaan yang lebih baik lagi karena dasar *sustainability* adalah bagaimana perusahaan bukan hanya sekedar mampu untuk menciptakan laba bagi perusahaan namun juga mampu untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui program kepedulian dan pemberdayaan pada masyarakat serta mampu berkontribusi bagi kelestarian alam dan lingkungan.

Pengembangan konsep *sustainability report* didasarkan pada teori *triple bottom-line of business* (teori 3P) dari John Elkington (1997). Menurut Elkington, apabila ingin bisnisnya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, maka korporasi harus peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam semesta (*planet*), masyarakat (*people*), dan pertumbuhan laba (*profits*). Ketiga P tersebut (3P) merupakan pilar dasar bisnis dari suatu korporasi (Lako, 2015:129).

Konsep ini yang kemudian dikembangkan dalam akuntansi menjadi perwujudan laporan berkelanjutan (*sustainability report*). *Sustainability report* dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi isu-isu dari dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dan berbagi informasi dengan *stakeholder*, termasuk regulator dan komunitas masyarakat yang lebih luas (Rusdiyanto, 2019:47).

*Sustainability report* berfokus pada:

1. Pelaporan, perencanaan komunikasi dan strategi.
2. Tinjauan dan perbaikan bagi pemerintah, sistem dan proses pelaporan pada bidang *sustainability reporting*.
3. Jaminan informasi non-finansial.
4. Analisa pelaporan dan timbal balik.

### **2.1.2.2 Pengertian *Sustainability Report***

Menurut Lako (2015:128), *sustainability report* merupakan model pelaporan informasi korporasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dengan pelaporan sosial (*social reporting*), pelaporan lingkungan (*environment reporting*) dan pelaporan tata kelola korporasi (*corporate governance reporting*) secara terpadu dalam satu paket pelaporan.

Berdasarkan Standar GRI (2016), *sustainability report* adalah praktik pelaporan organisasi secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya, baik secara positif ataupun negatif, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sementara berdasarkan standar GRI-G4 *Guidelines* (2013) *sustainability report* adalah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman penulis, pengertian *sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat

digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

### **2.1.2.3 Tujuan Penerbitan *Sustainability Report***

*Sustainability report* didesain untuk membantu korporasi merencanakan, mempersiapkan, melaporkan dan mengungkapkan informasi tentang komitmen, pelaksanaan, pengukuran, pengungkapan serta pertanggungjawaban korporasi terhadap kinerja pengelolaan isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan serta tata kelola korporasi kepada para *stakeholder* internal dan eksternal demi mewujudkan visi serta tujuan berkelanjutan korporasi dan para *stakeholder* (Lako, 2015:128).

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, *sustainability report* bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya (Nadapdap, 2018:181).

### **2.1.2.4 Manfaat *Sustainability Report***

Menurut Lako (2015:129-130), pengungkapan *sustainability report* memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan apresiasi para *stakeholder* terhadap akuntabilitas dan transparansi informasi perusahaan yang berimplikasi secara positif terhadap keputusan mereka.

2. Memberikan lisensi kemudahan kepada perusahaan dalam keputusan pendanaan dan investasi serta operasi bisnis.
3. Meningkatkan kinerja bisnis, kinerja keuangan dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
4. Meningkatkan citra, reputasi dan *goodwill* perusahaan.
5. Meningkatkan inovasi dan *continuous improvements*, posisi persaingan strategis dan sistem tata kelola perusahaan yang baik serta efektif.
6. Menurunkan risiko bisnis, risiko keuangan dan risiko pasar korporasi sebagai dampak positif dari apresiasi para pelaku pasar atau *stakeholder*.

Sementara menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) ([www.wbcsd.org](http://www.wbcsd.org)), manfaat yang didapat dari *sustainability report* antara lain:

1. *Sustainability report* memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal dan pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan serta membantu mewujudkan transparansi.
2. *Sustainability report* dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share* dan loyalitas konsumen jangka panjang.
3. *Sustainability report* dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. *Sustainability report* dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.

5. *Sustainability report* dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi dan sosial.
6. *Sustainability report* cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham dalam jangka panjang.
7. *Sustainability report* membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

#### **2.1.2.5 Prinsip-Prinsip *Sustainability Report***

*Sustainability report* sebagai pelengkap laporan keuangan perusahaan sangatlah penting bagi para *stakeholder* maupun perusahaan itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip *sustainability report* menurut *GRI Standards* (2016) adalah sebagai berikut:

1. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi.

2. Keseimbangan

Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan.

3. Kejelasan

Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang menggunakan informasi tersebut.

4. Keterbandingan

Organisasi harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan yang bisa mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya.

5. Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis dan melaporkan informasi serta proses yang digunakan dalam persiapan laporan dalam bentuk yang dapat diperiksa serta memiliki kualitas dan materialitas dari informasinya.

6. Ketepatan Waktu

Organisasi harus melapor secara rutin sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang terinformasi.

#### **2.1.2.6 Pengungkapan *Sustainability Report***

Pengungkapan informasi sosial dan lingkungan perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan *sustainability report*. Dimana masih belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan

*sustainability report* di Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan negara-negara di Eropa, dimana praktik pengungkapan *sustainability report* telah diwajibkan untuk semua sektor perusahaan. Sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf 12 menyatakan bahwa:

”Entitas dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Berdasarkan PSAK No.1 (revisi 2009) tersebut, maka perusahaan diharapkan untuk dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan tindakan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 ayat (1) yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam kaitannya dengan *sustainability development*, tidak hanya ada isu tunggal saja yang terdapat di dalamnya, melainkan isu ekonomi, isu sosial serta isu lingkungan (Nadapdap, 2018:182).

Sebagian besar bentuk pengungkapan *sustainability report* perusahaan diungkapkan melalui *website* perusahaan, dengan media ini siapa saja dapat mengakses sehingga mereka mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan pengamatan, *sustainability report* mengandung *narrative text*, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan *sustainability* perusahaan.

### **2.1.2.7 Indikator Pengungkapan *Sustainability Report***

*Global Reporting Initiative* (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh PBB melalui *Coalition for Environmental Economies* (CERES) dan (UNEP) pada tahun 1997. GRI merupakan organisasi non-profit yang mempromosikan keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan. GRI menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif bagi semua perusahaan dan organisasi yang banyak digunakan di seluruh dunia.

Pedoman pengungkapan GRI terdiri dari G3, G3.1, G4 dan *GRI standards*. G3 atau yang sering dikenal dengan G3.0 merupakan versi awal dari pedoman GRI yang terdiri dari 79 indikator. G3.1 merupakan versi pengembangan dari G3 yang di dalamnya terkandung 84 indikator, termasuk 79 indikator yang digunakan sebelumnya pada G3 dengan beberapa perubahan dan tambahan-tambahan lainnya yang dinilai lebih menyempurnakan pedoman GRI. G4 merupakan versi pengembangan dari G3.1 yang memiliki 91 indikator. *GRI standards* merupakan pedoman terbaru yang diterbitkan pada kuartal keempat tahun 2016, yang kemudian diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017. GRI-G4 dan *GRI standards* secara umum isi keduanya tidak jauh berbeda. Hanya ada 2 (dua) indikator spesifik yang “*discontinued*” dan total 42 yang direvisi. Selebihnya mengalami perubahan minor atau perubahan klasifikasi indikator.

Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut. *GRI standards* (2016) menyebutkan bahwa perusahaan harus menjelaskan dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan pada bagian *standard*

*disclosure. Sustainability report* menggunakan *GRI standards* (2016) mencakup standar ekonomi, lingkungan dan sosial, yaitu:

1. Standar Ekonomi (*Economic Standards*) (GRI 200)

GRI 200 mencakup standar topik spesifik yang digunakan untuk melaporkan informasi tentang dampak material organisasi terkait topik ekonomi, yang meliputi:

- a. GRI 201: Kinerja Ekonomi
- b. GRI 202: Keberadaan Pasar
- c. GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung
- d. GRI 204: Praktik Pengadaan
- e. GRI 205: Anti-korupsi
- f. GRI 206: Perilaku Anti-persaingan

2. Standar Lingkungan (*Environmental Standards*) (GRI 300)

GRI 300 mencakup standar topik spesifik yang digunakan untuk melaporkan informasi tentang dampak material organisasi terkait topik lingkungan, yang meliputi:

- a. GRI 301: Material
- b. GRI 302: Energi
- c. GRI 303: Air
- d. GRI 304: Keanekaragaman Hayati
- e. GRI 305: Emisi
- f. GRI 306: Air Limbah (Efluen) dan Limbah
- g. GRI 307: Kepatuhan Lingkungan
- h. GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok

3. Standar Sosial (*Social Standards*) (GRI 400)

GRI 400 mencakup standar topik spesifik yang digunakan untuk melaporkan informasi tentang dampak material organisasi terkait topik sosial, yang meliputi:

- a. GRI 401: Kepegawaian
- b. GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen
- c. GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- d. GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan
- e. GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara
- f. GRI 406: Non-diskriminasi
- g. GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif
- h. GRI 408: Pekerja Anak
- i. GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja
- j. GRI 410: Praktik Keamanan
- k. GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat
- l. GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia
- m. GRI 413: Masyarakat Lokal
- n. GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok
- o. GRI 415: Kebijakan Publik
- p. GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
- q. GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan
- r. GRI 418: Privasi Pelanggan
- s. GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi

Secara rinci, item-item yang digunakan dalam pengungkapan *sustainability report* disajikan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 Indeks Pengungkapan *Sustainability Report*  
Berdasarkan Indikator *GRI Standards 2016***

<b>Standar</b>	<b>GRI</b>
<b>EKONOMI (GRI 200)</b>	<b>GRI 201: Kinerja Ekonomi</b>
	201-1 : Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan.
	201-2 : Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim.
	201-3 : Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya.
	201-4 : Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah.
	<b>GRI 202: Keberadaan Pasar</b>
	202-1 : Rasio standar upah karyawan <i>entry-level</i> berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional.
	202-2 : Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal.
	<b>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b>
	203-1 : Investasi infrastruktur dan dukungan layanan.
	203-2 : Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan.
	<b>GRI 204: Praktik Pengadaan</b>
	204-1 : Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal.
	<b>GRI 205: Anti-korupsi</b>
	205-1 : Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi.
	205-2 : Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi.
	205-3 : Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.
	<b>GRI 206: Perilaku Anti-persaingan</b>
	206-1 : Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli.
	<b>LINGKUNGAN (GRI 300)</b>
301-1 : Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume.	
301-2 : Material input dari daur ulang yang digunakan.	
301-3 : Produk reclaimed dan material kemasannya.	
<b>GRI 302: Energi</b>	
302-1 : Konsumsi energi dalam organisasi.	
302-2 : Konsumsi energi di luar organisasi.	
302-3 : Intensitas energi.	
302-4 : Pengurangan konsumsi energi.	
302-5 : Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk	

	produk dan jasa.
	<b>GRI 303: Air</b>
	303-1 : Pengambilan air berdasarkan sumber.
	303-2 : Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air.
	303-3 : Daur ulang dan penggunaan air kembali.
	<b>GRI 304: Keanekaragaman Hayati</b>
	304-1 : Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung.
	304-2 : Dampak signifikan dari kegiatan, produk dan jasa pada keanekaragaman hayati.
	304-3 : Habitat yang dilindungi atau direstorasi.
	304-4 : Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah terkena efek operasi.
	<b>GRI 305: Emisi</b>
	305-1 : Emisi GRK (Cakupan 1) langsung.
	305-2 : Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung.
	305-3 : Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya.
	305-4 : Intensitas emisi GRK.
	305-5 : Pengurangan emisi GRK.
	305-6 : Emisi zat perusak ozon (ODS).
	305-7 : Nitrogen oksida (NO <sub>x</sub> ), sulfur oksida (SO <sub>x</sub> ) dan emisi udara yang signifikan lainnya.
	<b>GRI 306: Air Limbah (Efluen) dan Limbah</b>
	306-1 : Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan.
	306-2 : Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
	306-3 : Tumpahan yang signifikan.
	306-4 : Pengangkutan limbah berbahaya.
	306-5 : Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air.
	<b>GRI 307: Kepatuhan Lingkungan</b>
	307-1 : Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup.
	<b>GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok</b>
	308-1 : Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan.
	308-2 : Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil.
<b>SOSIAL (GRI 400)</b>	<b>GRI 401: Kepegawaian</b>
	401-1 : Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan.
	401-2 : Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu.
	401-3 : Cuti melahirkan.

<b>GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen</b>
402-1 : Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional.
<b>GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>
403-1 : Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemen-pekerja untuk kesehatan dan keselamatan.
403-2 : Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, hari kerja yang hilang dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan.
403-3 : Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan pekerjaan mereka.
403-4 : Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh.
<b>GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan</b>
404-1 : Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan.
404-2 : Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan.
404-3 : Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier.
<b>GRI 405: Keanekaragaman dan Kesempatan Setara</b>
405-1 : Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan.
405-2 : Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki.
<b>GRI 406: Non-diskriminasi</b>
406-1 : Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan.
<b>GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif</b>
407-1 : Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko.
<b>GRI 408: Pekerja Anak</b>
408-1 : Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak.
<b>GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja</b>
409-1 : Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja.
<b>GRI 410: Praktik Keamanan</b>
410-1 : Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia.
<b>GRI 411: Hak-Hak Masyarakat Adat</b>
411-1 : Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat.
<b>GRI 412: Penilaian Hak Asasi Manusia</b>
412-1 : Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak.
412-2 : Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia.

	412-3 : Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia.
	<b>GRI 413: Masyarakat Lokal</b>
	413-1 : Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak dan program pengembangan.
	413-2 : Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal.
	<b>GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok</b>
	414-1 : Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial.
	414-2 : Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil.
	<b>GRI 415: Kebijakan Publik</b>
	415-1 : Kontribusi Politik.
	<b>GRI 416: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</b>
	416-1 : Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa.
	416-2 : Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa.
	<b>GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan</b>
	417-1 : Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa.
	417-2 : Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa.
	417-3 : Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran.
	<b>GRI 418: Privasi Pelanggan</b>
	418-1 : Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan.
	<b>GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi</b>
	419-1 : Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi.

Sumber: GRI Standards, 2016

### 2.1.2.8 Metode Pengukuran *Sustainability Report*

Item-item pengungkapan *sustainability report* dapat diukur dengan menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI), yang diungkapkan dalam *Global Reporting Initiative* (GRI). Perhitungan SRDI dilakukan dengan

memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan.

Rumus perhitungan pengungkapan *sustainability report* adalah sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{n}{k}$$

Keterangan:

SRDI : *Sustainability Report Disclosure Index*

n : Total *sustainability disclosure* (Jumlah item yang diungkapkan perusahaan)

k : Jumlah item yang diharapkan (Jumlah indikator dalam standar GRI)

### 2.1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan dalam rangka menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report*, namun hasil-hasil penelitian tersebut belum konsisten satu sama lain. Adapun penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* disajikan pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  
Tentang Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Sustainability Report***

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada	<b>Variabel Independen (X):</b> 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. Aktivitas Perusahaan 5. Ukuran Perusahaan	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 2. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap

		Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI.	6. Komite Audit 7. Dewan Direksi 8. <i>Governance Committee</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> 1. Praktik Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 3. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 4. Aktivitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 6. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 7. Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 8. <i>Governance committee</i> berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
2.	Hasanah, N., Syam, D., & Jati, A. W. (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan di	<b>Variabel Independen (X):</b> 1. Dewan Komisaris 2. Dewan Direksi 3. Komite Audit	1. Secara parsial <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .

		Indonesia.	<b>Variabel Dependen (Y):</b> 1. Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	
3.	Aniktia, R., & Khafid, M. (2015)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .	<b>Variabel Independen (X):</b> 1. Dewan Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. Kepemilikan Manajerial 4. <i>Governance Committee</i> 5. Profitabilitas 6. <i>Leverage</i>  <b>Variabel Dependen (Y):</b> 1. Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	1. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 2. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 4. <i>Governance committee</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 5. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> ; 6. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
4.	Rosyid, M. F. (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap	<b>Variabel Independen (X):</b> 1. Profitabilitas 2. Kepemilikan Manajerial	1. ROA berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability report</i> . 2. Kepemilikan manajerial tidak

		<i>Sustainability Report</i> pada Perusahaan BUMN yang <i>Listed</i> di BEI.	3. Dewan Komisaris Independen 4. Dewan Direksi 5. Komite Audit  <b>Variabel Dependen (Y):</b> 1. <i>Sustainability Report</i>	berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> . 3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability report</i> . 4. Dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability report</i> . 5. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability report</i> .
5.	Amran, A., Lee, S. P., & Selvaraj, S. (2013)	<i>The Influence of Governance Structure and Strategic Corporate Sosial Responsibility Toward Sustainability Reporting Quality.</i>	<b>Variabel Independen (X):</b> 1. Ukuran Dewan Direksi 2. Dewan Direksi Independen 3. Keanekaragaman Gender Dewan Direksi 4. Visi dan Misi Perusahaan yang Terintegrasi dengan Nilai CSR. 5. Keberadaan Komite CSR 6. Kolaborasi dengan LSM  <b>Variabel Dependen (Y):</b> 1. Kualitas <i>Sustainability Reporting</i>	1. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas <i>sustainability reporting</i> ; 2. Dewan direksi independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas <i>sustainability reporting</i> ; 3. Keanekaragaman gender dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas <i>sustainability reporting</i> ; 4. Visi dan Misi perusahaan yang terintegrasi dengan nilai CSR berpengaruh positif terhadap kualitas <i>sustainability reporting</i> ; 5. Keberadaan komite CSR berpengaruh

				positif terhadap kualitas <i>sustainability reporting</i> ; 6. Kolaborasi dengan LSM berpengaruh positif terhadap kualitas <i>sustainability reporting</i> .
6.	Michelon, G., & Parbonetti, A. (2010)	<i>The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure.</i>	<p><b>Variabel Independen (X):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi Dewan: Direktur Independen</li> <li>2. Karakteristik Dewan: Anggota yang Berpengaruh di Masyarakat</li> <li>3. Struktur Dewan: Kehadiran Komite CSR</li> <li>4. Kepemimpinan Dewan: Dualitas CEO</li> </ol> <p><b>Variabel Dependen (Y):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Corporate Sustainability Disclosure</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi dewan: Direktur independen tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability disclosure</i>;</li> <li>2. Karakteristik dewan: Anggota yang berpengaruh di masyarakat berpengaruh positif terhadap <i>sustainability disclosure</i>;</li> <li>3. Struktur dewan: Kehadiran komite CSR berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability disclosure</i>;</li> <li>4. Kepemimpinan dewan: Dualitas CEO tidak berpengaruh terhadap <i>sustainability disclosure</i>.</li> </ol>

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

## 2.2 Kerangka Pemikiran

*Sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan

dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

Dengan menyusun *sustainability report*, maka pemakai informasi mengetahui apakah perusahaan transparan dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada lingkungan, manajemen, karyawan, masyarakat dan alam, pengaruh proses produksi atau aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan sejauh mana perusahaan mengomunikasikan hal tersebut kepada publik serta apakah perusahaan jujur terhadap diri mereka sendiri dan terhadap lingkungan.

*Sustainability report* merupakan bukti bahwa telah adanya komitmen dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang dapat dinilai hasilnya oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu, *sustainability report* menjadi bukti salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi, baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan warga negara ataupun *stakeholder*-nya sebagai salah satu upaya penerapan pendidikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan *sustainability report* pada saat ini menempati posisi yang sama pentingnya juga dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

*Good corporate governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang mengacu pada struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk tujuan pengarahan dan pengendalian perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Penerapan GCG tidak hanya mendukung upaya perusahaan dalam mencapai tujuannya, namun juga turut memaksimalkan nilai jangka panjang bagi

para pemegang saham serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan yang lain. Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, sesuai dengan prinsip GCG yaitu transparansi, perusahaan dituntut untuk dapat mengungkapkan semua informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Informasi keuangan diungkapkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan, sementara informasi non-keuangan berupa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Dengan tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap elemen perusahaan menjadi unsur komitmen dan konsistensi perusahaan untuk selalu peduli bukan hanya pada keuntungan perusahaan, namun juga bagaimana peduli kepada masyarakat dan mampu menjaga dan memelihara lingkungan, dimana informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan diungkapkan dalam *sustainability report*.

Mekanisme GCG tentu turut serta dalam proses pengungkapan *sustainability report* karena untuk menghasilkan *sustainability report* yang berkualitas, keterlibatan struktur *corporate governance* dalam GCG sangat diperlukan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa mekanisme GCG terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan dewan direksi, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya GCG, seperti sekretaris perusahaan, komite audit dan komite-komite lain yang mendukung pelaksanaan GCG.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) mekanisme GCG (dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit) untuk melihat adanya pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### **2.2.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

Dewan komisaris adalah suatu dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Tugas dan wewenang dewan komisaris yaitu melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direksi. Terdapat kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direksi, apabila direksi berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

*Sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

Indikator yang digunakan untuk mengukur dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan sebuah mekanisme akuntabilitas yang berperan dalam meyakinkan bahwa perusahaan memenuhi kepentingan para *stakeholder*. Untuk mewujudkan akuntabilitas, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang

lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan *sustainability report*.

Dengan wewenang yang dimilikinya, dewan komisaris dapat melakukan pengawasan atas jalannya usaha perusahaan termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan demikian, pengungkapan *sustainability report* semakin luas.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka diperoleh hipotesis bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hipotesis ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan, karena keberadaan dewan komisaris dapat memberikan kontrol dan pengawasan bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hipotesis ini didukung juga penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2011) yang menjelaskan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial perusahaan karena dengan semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat diharapkan *monitoring* (pengawasan) yang dilakukan oleh dewan komisaris akan semakin baik. Dengan demikian, pengungkapan informasi sosial perusahaan juga akan semakin luas.

## 2.2.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability*

### *Report*

Direksi atau dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan atau dapat dikatakan bahwa dewan direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga. Pada umumnya dewan direksi memiliki tugas antara lain, memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer) atau wakil direksi, menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi, serta menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan atau institusi.

*Sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

Indikator yang digunakan untuk mengukur dewan direksi adalah jumlah anggota direksi. Dewan direksi merupakan pusat sistem *good corporate governance* (GCG) yang berperan dalam mengelola perusahaan demi terciptanya kelangsungan jangka panjang dari perusahaan. Dewan direksi dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan direksi yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan *sustainability report*.

Dalam pengertian yang sederhana, *good corporate governance* (GCG) dapat dilihat sebagai sekumpulan tatanan yang berlaku ke dalam perusahaan yang selanjutnya menunjukkan hubungan-hubungan antara manajer dan pemegang saham. Dewan direksi merupakan pusat sistem *good corporate governance* (GCG). Sebagai pusat sistem *good corporate governance* (GCG), dewan direksi memiliki tanggung jawab utama memastikan kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan demi terciptanya kelangsungan jangka panjang dari perusahaan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut mencakup juga pengungkapan *sustainability report*. Dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai pengungkapan *sustainability report*, maka pengungkapan *sustainability report* semakin luas.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka diperoleh hipotesis bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hipotesis ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap praktik pengungkapan *sustainability report*. Hipotesis ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Idah (2013) yang menyatakan bahwa dewan direksi memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### **2.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability***

#### ***Report***

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (2019), komite audit merupakan organisasi yang mampu mendorong diterapkannya *good corporate governance*

(GCG) di Indonesia. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya (www.komiteaudit.or.id, 2019).

*Sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit adalah jumlah anggota komite audit. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Dengan demikian, dengan ukuran komite audit yang semakin besar diharapkan pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan dapat meningkatkan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan (*sustainability report*) yang dilakukan oleh perusahaan.

Koordinasi komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, dimana semakin sering komite audit mengadakan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik sehingga dapat melaksanakan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan diharapkan dapat mendukung peningkatan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka diperoleh hipotesis bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hipotesis ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015) yang menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, karena pengawasan secara mendalam dari komite audit mampu mendorong perusahaan untuk melakukan pengawasan lebih baik sehingga prinsip-prinsip GCG dapat terpenuhi, salah satunya prinsip transparansi dimana perusahaan diwajibkan untuk terbuka atas segala aktivitas bisnis yang dilakukan dan kemudian melakukan pelaporan. Hipotesis ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rosyid (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh pengungkapan *sustainability report*.

#### **2.2.4 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

*Sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

Pengungkapan *sustainability report* tidak terlepas dari keterlibatan mekanisme GCG (dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit). Dengan meningkatnya pengawasan dewan komisaris terkait jalannya usaha perusahaan, diterbitkannya kebijakan-kebijakan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial

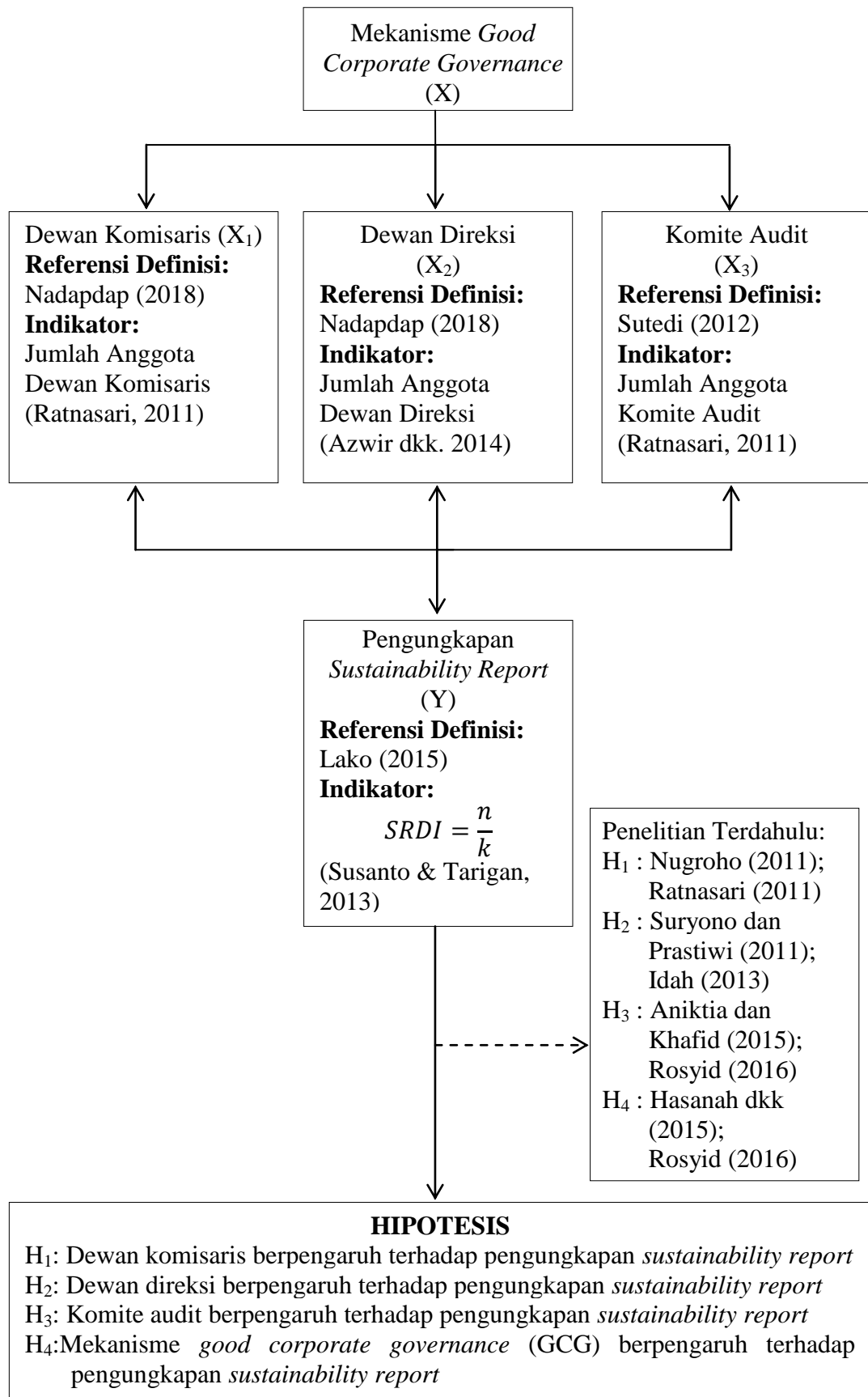
dan lingkungan yang dilakukan oleh dewan direksi, serta meningkatnya koordinasi komite audit dapat memperluas pengungkapan *sustainability report*.

Dengan tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap elemen perusahaan menjadi unsur komitmen dan konsistensi perusahaan untuk selalu peduli bukan hanya pada keuntungan perusahaan, namun juga bagaimana peduli kepada masyarakat dan mampu menjaga dan memelihara lingkungan, dimana informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan diungkapkan dalam *sustainability report*.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka diperoleh hipotesis bahwa mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Hipotesis ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, dkk (2015) dan Rosyid (2016) yang menyatakan bahwa mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

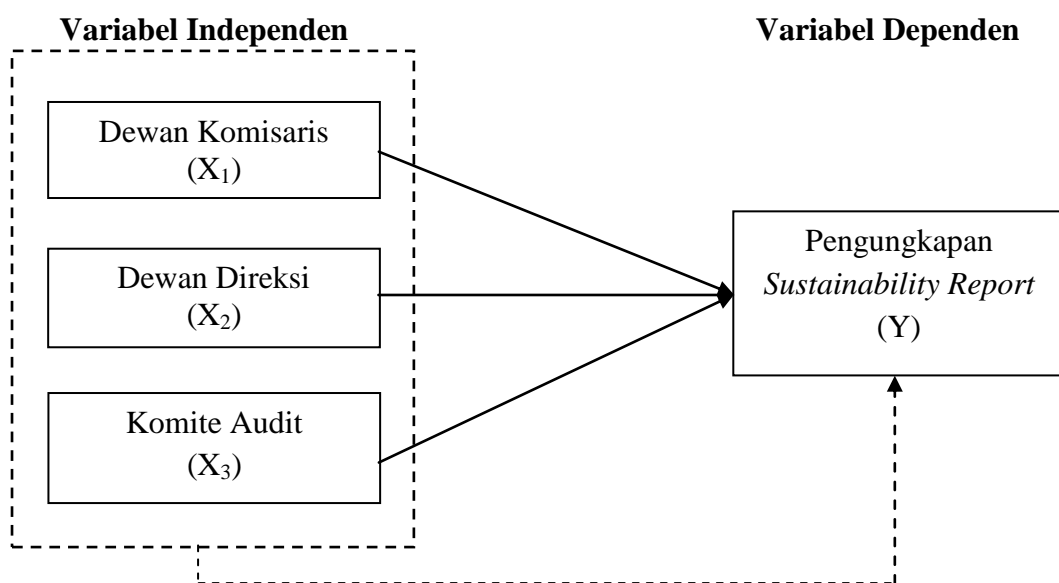
Secara keseluruhan, alur kerangka pemikiran yang sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*” ditunjukkan melalui gambar 2.1 berikut:



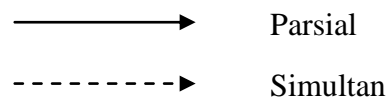
**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**  
**Sumber: Data diolah Peneliti, 2019**

### 2.2.5 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka paradigma penelitian yang sesuai dengan penelitian ini ditunjukkan melalui gambar 2.2 berikut:



Keterangan :



**Gambar 2.2 Paradigma Penelitian**  
**Sumber: Data diolah Peneliti, 2019**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian keterkaitan dewan komisaris, direksi dan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* di atas mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- H<sub>2</sub> : Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- H<sub>3</sub> : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- H<sub>4</sub> : Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian dan Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Objek Penelitian**

Sugiyono (2017:2) menyatakan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid* dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini mencakup mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang diklasifikasikan menjadi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2016-2018.

##### **3.1.2 Gambaran Umum Perusahaan**

Menurut survei tahunan dari *Price Waterhouse Coopers* (PwC, 2015:1-4), produk pertambangan memberikan kontribusi ekspor, PDB, pajak dan pungutan bukan pajak yang signifikan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang secara terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.

Sebagai produsen minyak terbesar di dunia, produsen timah kedua di dunia, produsen tembaga kedua di dunia, produsen batubara ketiga di dunia, produsen nikel keempat di dunia dan produsen emas keenam di dunia menjadikan

Indonesia sebagai salah satu negara penting dalam pertambangan (Ikatan Ahli Geologi Indonesia, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan mineral sehingga cukup layak apabila Indonesia dikatakan sebagai negara pertambangan.

Sektor pertambangan terdiri atas 4 (empat) sub-sektor, yaitu sub-sektor batubara, sub-sektor minyak mentah dan gas bumi, sub-sektor logam dan mineral lainnya, dan sub-sektor tanah dan batu galian.

### 3.1.2.1 Sub-Sektor Batubara

Sejak lama Indonesia dikenal sebagai penghasil sumber daya tambang salah satunya adalah batubara. Indonesia merupakan salah satu penghasil batubara terbesar dunia yang kualitasnya sudah diakui dan akan tetap menempati posisi yang penting terhadap stabilitas pasokan batubara. Batubara Indonesia memiliki kadar abu dan sulfur yang rendah sehingga dikenal ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan batubara Indonesia semakin komparatif di pasar dunia, di tengah kesadaran lingkungan yang makin meningkat pada saat ini. Adapun perusahaan yang terdaftar di sub-sektor batubara dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Perusahaan Sub-Sektor Batubara**

No.	Kode	Nama Perusahaan	IPO
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk	16/07/2008
2.	ARII	Atlas Resources Tbk	08/11/2011
3.	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk	17/04/2002
4.	BORN	Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	26/11/2010
5.	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	15/02/2018
6.	BRMS	Bumi Resouces Minerals Tbk	09/12/2010
7.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	08/11/2012
8.	BUMI	Bumi Resources Tbk	30/07/1990
9.	BYAN	Bayan Resources Tbk	12/08/2008
10.	DEWA	Darma Henwa Tbk	26/09/2007
11.	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	15/06/2001

12.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	10/12/2009
13.	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk	09/06/2017
14.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	17/11/2011
15.	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	09/07/2017
16.	HRUM	Harum Energy Tbk	06/10/2010
17.	INDY	Indika Energy Tbk	11/06/2008
18.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	18/12/2007
19.	KKGI	Resources Alam Indonesia Tbk	01/07/1991
20.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	10/07/2014
21.	MYOH	Samindo Resources Tbk	27/07/2000
22.	PTBA	Bukit Asam Tbk	23/12/2002
23.	PTRO	Petrosea Tbk	21/05/1990
24.	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk	01/12/2007
25.	SMRU	SMR Utama Tbk	10/10/2011
26.	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	06/07/2012
27.	TRAM	Trada Alam Minera Tbk	10/09/2008

**Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2019**

### **3.1.2.2 Sub-Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi**

Dilansir dari situs [prosesindustri.com](http://prosesindustri.com) (2015), Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, baik itu sumber daya alam yang berada di atas permukaan tanah maupun yang berada di bawah permukaan tanah. Salah satu sumber daya alam yang dimaksud yaitu minyak bumi. Saat ini, Indonesia memiliki 7 provinsi penghasil minyak bumi terbesar dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas produksi migas tertinggi Asia Tenggara. Kenyataan tersebut membuat kegiatan bisnis migas di negara ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, diperkirakan jumlah minyak bumi yang di keruk dari dalam perut bumi di berbagai wilayah Indonesia mencapai 915.798 barel/hari. Adapun perusahaan yang terdaftar di sub-sektor minyak mentah dan gas bumi dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2 Perusahaan Sub-Sektor Minyak Mentah dan Gas Bumi**

<b>No.</b>	<b>Kode</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>IPO</b>
1.	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk	10/07/2002
2.	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	30/04/2003
3.	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	11/02/2010
4.	ELSA	Elnusa Tbk	06/02/2000
5.	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	07/06/2004
6.	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	01/02/2012
7.	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	12/10/1994
8.	MITI	Mitra Investindo Tbk	16/07/1997
9.	MTFN	Capitalinc Investment Tbk	16/04/1990
10.	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	11/07/2007
11.	SURE	Super Energy Tbk	05/10/2018

**Sumber: www.idx.co.id, 2019**

### **3.1.2.3 Sub-Sektor Logam dan Mineral Lainnya**

Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 2009, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan komoditas tambang, antara lain:

1. Mineral radioaktif, meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan mineral radioaktif lainnya.
2. Mineral logam, meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium,

rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.

3. Mineral bukan logam, meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Adapun perusahaan yang terdaftar di sub-sektor logam dan mineral lainnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3 Perusahaan Sub-Sektor Logam dan Mineral Lainnya**

No.	Kode	Nama Perusahaan	IPO
1.	ANTM	Aneka Tambang Tbk	27/11/1997
2.	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	20/03/2002
3.	DKFT	Central Omega Resources Tbk	21/11/1997
4.	INCO	Vale Indonesia Tbk	16/05/1990
5.	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	19/06/2015
6.	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk	22/04/2003
7.	TINS	TImah Tbk	19/10/1995
8.	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk	16/10/2017

**Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2019**

#### 3.1.2.4 Sub-Sektor Tanah dan Batu Galian

Pengaturan mengenai penggolongan bahan galian pada Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, pertambangan tanah dan batu galian meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa,

jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Adapun perusahaan yang terdaftar di sub-sektor tanah dan batu galian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4 Perusahaan Sub-Sektor Tanah dan Batu Galian**

No.	Kode	Nama Perusahaan	IPO
1.	CTTH	Citatah Tbk	03/07/1996

**Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2019**

## **3.2 Metode Penelitian**

### **3.2.1 Metode yang digunakan**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2017:2).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme (memandang fenomena atau gejala itu dapat diklasifikasikan, teramati terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat), digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan benar atau tidaknya fakta-fakta yang ada serta untuk menjelaskan hubungan antar variabel mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang diklasifikasikan menjadi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik verifikatif. Menurut Sugiyono (2017:35), penelitian deskriptif dilakukan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana mekanisme *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.

Metode statistik verifikatif menurut Sugiyono (2017:21) adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian dan suatu perhitungan statistik didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima melalui pengumpulan data di lapangan, yang berupa sampel data sekunder. Dalam penelitian ini metode verifikatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apakah terdapat pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### **3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017:38), variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasional variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

#### **3.2.2.1 Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2017:39), variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor* atau *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme *good corporate governance*, yang kemudian diklasifikasikan menjadi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit.

##### **1. Dewan Komisaris**

Dalam penelitian ini, dewan komisaris diukur dengan menggunakan ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan

menghitung jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam *annual report* atau laporan tahunan perusahaan.

2. Dewan Direksi

Dalam penelitian ini, dewan direksi diprosikan dengan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam *annual report* atau laporan tahunan perusahaan.

3. Komite Audit

Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan menggunakan ukuran komite audit. Ukuran komite audit merupakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam *annual report* atau laporan tahunan perusahaan.

### 3.2.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel *output*, kriteria atau variabel konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *sustainability report*.

Dalam penelitian ini, pengungkapan *sustainability report* diukur dengan menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI). Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan, dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap

perusahaan. Rumus perhitungan pengungkapan *sustainability report* adalah sebagai berikut:

$$SRDI = \frac{n}{k}$$

Keterangan:

SRDI : *Sustainability Report Disclosure Index*

n : Total *sustainability disclosure* (Jumlah item yang diungkapkan perusahaan)

k : Jumlah item yang diharapkan (Jumlah indikator dalam standar GRI)

Secara rinci, operasionalisasi variabel penelitian dapat dilihat pada tabel

3.5 berikut:

**Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Sub Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Variabel Independen (X)	Dewan Komisaris (X <sub>1</sub> )	Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007).	Jumlah Anggota Dewan Komisaris  (Ratnasari, 2011)	Nominal
	Dewan Direksi (X <sub>2</sub> )	Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Nadapdap, 2018:109).	Jumlah Anggota Dewan Direksi  (Azwir dkk, 2014).	Nominal
	Komite Audit (X <sub>3</sub> )	Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam	Jumlah Anggota Komite Audit	Nominal

		membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5).	(Ratnasari, 2011)	
Variabel Dependen (Y)	Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Y)	<i>Sustainability report</i> merupakan model pelaporan informasi korporasi kepada para pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan ( <i>financial reporting</i> ) dengan pelaporan sosial ( <i>social reporting</i> ), pelaporan lingkungan ( <i>environment reporting</i> ), dan pelaporan tata kelola korporasi ( <i>corporate governance reporting</i> ) secara terpadu dalam satu paket pelaporan (Lako, 2015:128).	<i>Sustainability Report Disclosure Index</i> $SRDI = \frac{n}{k}$  (Susanto & Tarigan, 2013).	Rasio

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

### 3.2.3 Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya ditunjukkan untuk orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang *go public* yang termasuk ke dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.6 Populasi Penelitian  
Perusahaan Sektor Pertambangan**

No.	Kode	Nama Perusahaan	IPO
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	16/07/2008
2.	ANTM	Aneka Tambang Tbk	27/11/1997
3.	APEX	Apexindo Pratama Duta Tbk	10/07/2002
4.	ARII	Atlas Resources Tbk	08/11/2011
5.	ARTI	Ratu Prabu Energi Tbk	30/04/2003
6.	ATPK	Bara Jaya Internasional Tbk	17/04/2002
7.	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk	11/02/2010
8.	BORN	Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk	26/11/2010
9.	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	15/02/2018
10.	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk	09/12/2010
11.	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	08/11/2012
12.	BUMI	Bumi Resources Tbk	30/07/1990
13.	BYAN	Bayan Resources Tbk	12/08/2008
14.	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	20/03/2002
15.	CTTH	Citatah Tbk	03/07/1996
16.	DEWA	Darma Henwa Tbk	26/09/2007
17.	DKFT	Central Omega Resources Tbk	21/11/1997
18.	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk	15/06/2001
19.	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	10/12/2009
20.	ELSA	Elnusa Tbk	06/02/2008
21.	ENRG	Energi Mega Persada Tbk	07/06/2004
22.	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	01/02/2012
23.	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk	09/06/2017
24.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	17/11/2011
25.	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	09/07/2017
26.	HRUM	Harum Energy Tbk	06/10/2010
27.	INCO	Vale Indonesia Tbk	16/05/1990
28.	INDY	Indika Energy Tbk	11/06/2008
29.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	18/12/2007
30.	KKGI	Resources Alam Indonesia Tbk	01/07/1991
31.	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	10/07/2014

32.	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	19/06/2015
33.	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk	12/10/1994
34.	MITI	Mitra Investindo Tbk	16/07/1997
35.	MTFN	Capitalinc Investment Tbk	16/04/1990
36.	MYOH	Samindo Resources Tbk	27/07/2000
37.	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	11/07/2007
38.	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk	22/04/2003
39.	PTBA	Bukit Asam Tbk	23/12/2002
40.	PTRO	Petrosea Tbk	21/05/1990
41.	SMMT	Golden Eagle energy Tbk	01/12/2007
42.	SMRU	SMR Utama Tbk	10/10/2011
43.	SURE	Super Energy Tbk	05/10/2018
44.	TINS	Timah Tbk	19/10/1995
45.	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	06/07/2012
46.	TRAM	Trada Alam Minera Tbk	10/09/2008
47.	ZINC	Kapuas Prima Coal Tbk	16/10/2017

**Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2019**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan sampel yang diambil dari populasi diharapkan betul-betul representatif atau mewakili populasi. Kesimpulan yang ditarik dari sampel akan mampu diberlakukan untuk keseluruhan populasi (Sugiyono, 2017:81). Sementara menurut Sekaran Nuryaman dan Christina (2015:101), sampel merupakan bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu teknik dari *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2017:85). Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan.

Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI hingga tahun 2018.

2. Perusahaan sektor pertambangan yang telah menerbitkan atau mengungkapkan *sustainability report* setiap tahun selama periode 2016-2018.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang melaporkan *annual report* selama periode 2016-2018.

Sampel yang telah terseleksi dengan metode *purposive sampling method* dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

**Tabel 3.7 Seleksi Sampel Penelitian**

Kriteria Sampel	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI hingga tahun 2018	47
Perusahaan yang tidak menerbitkan atau mengungkapkan <i>sustainability report</i> setiap tahun selama periode 2016-2018	(40)
Perusahaan yang tidak melaporkan <i>annual report</i> selama periode 2016-2018	(0)
<b>Jumlah sampel terseleksi yang digunakan</b>	<b>7</b>

Sumber: Data diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan hasil *sampling* di atas, maka sampel yang diambil sebanyak 7 perusahaan dari 47 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Adapun daftar dari perusahaan sampel dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut:

**Tabel 3.8 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian**

No.	Kode	Nama Perusahaan	Sektor Industri	Sub Sektor
1.	ANTM	Aneka Tambang Tbk	Pertambangan	Logam dan Mineral Lainnya
2.	BUMI	Bumi Resources Tbk	Pertambangan	Batubara
3.	INCO	Vale Indonesia Tbk	Pertambangan	Logam dan Mineral Lainnya
4.	INDY	Indika Energy Tbk	Pertambangan	Batubara
5.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	Pertambangan	Batubara
6.	PTBA	Bukit Asam Tbk	Pertambangan	Batubara
7.	PTRO	Petrosea Tbk	Pertambangan	Batubara

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan diolah Peneliti, 2019

### **3.2.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.2.4.1 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari *annual report* atau laporan tahunan perusahaan dan *sustainability report* perusahaan, ikhtisar statistik, laporan-laporan yang memuat berbagai informasi tentang masalah yang akan diteliti, serta studi pustaka dengan cara membaca serta mendalami literatur.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan *website* resmi masing-masing perusahaan sampel setiap tahun selama periode 2016-2018.

#### **3.2.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:224), pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal maupun tulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan studi ini adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai

landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang diteliti sebagai pedoman untuk melakukan penelitian.

## 2. Laporan Data Publikasi

Sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber referensi dari perpustakaan yang ada, peneliti melakukan pencarian data-data sekunder melalui situs internet [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) untuk memperoleh laporan tahunan perusahaan (*annual report*) selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dan juga melalui situs internet masing-masing perusahaan sampel terkait pengungkapan *sustainability report*. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel, jurnal penelitian terdahulu dan buku yang terkait dengan penelitian guna memperoleh tambahan literatur atau data relevan terpercaya lainnya yang dibutuhkan.

### 3.2.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis ini dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.

Teknik analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data, mentabulasi data dan menyajikan data berdasarkan variabel yang diteliti serta melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2016:147).

### **3.2.5.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan dan menyajikan informasi secara ringkas dari sejumlah besar data. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, *pictogram*, perhitungan *modus*, *median*, *mean*, (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desik, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dari standar deviasi dan perhitungan prosentase (Sugiyono, 2017:147-148).

Sementara menurut Ghozali (2016:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kecondongan distribusi).

### **3.2.5.2 Analisis Statistik Verifikatif**

Setelah mendeskripsikan mengenai masing-masing variabel dalam penelitian, selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan analisis verifikatif guna untuk mengetahui hubungan pada masing-masing variabel penelitian. Metode statistik verifikatif menurut Sugiyono (2017:21) adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian dan suatu perhitungan statistik didapat hasil pembuktian yang

menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima melalui pengumpulan data di lapangan, yang berupa sampel data sekunder.

### **3.2.5.3 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat sebagai asumsi dasar dalam analisis regresi agar hasilnya tidak bias. Untuk itu, diperlukan beberapa tes yang memungkinkan pendeteksian pelanggaran asumsi tersebut, diantaranya:

#### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2016:156). Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Menurut Ghozali (2016:156), uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu, uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_a$  : Data residual berdistribusi tidak normal

Kriteria yang digunakan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas (sig.)  $< 0,05$  maka data residual terdistribusi secara tidak normal ( $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima).
2. Jika nilai probabilitas (sig.)  $> 0,05$  maka data residual terdistribusi secara normal ( $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak).

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari:

- a. Nilai *tolerance* dan lawannya
- b. *Variance Inflation Factor* (VIF).

*Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan ada multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \geq 10$ . Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat masalah multikolonieritas

atau adanya hubungan korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:103-104).

### 3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016:107). Metode yang sering digunakan adalah metode uji Durbin-Watson (*DW Test*) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson**

Kesimpulan	Jika
Terdapat autokorelasi positif	$d < d_L$
Ragu-ragu	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak terdapat autokorelasi	$d_U \leq d \leq 4-d_U$
Ragu-ragu	$4-d_U \leq d \leq 4-d_L$
Terdapat autokorelasi negatif	$d > 4-d_L$

Sumber : Ghozali (2016:107)

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Plot dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2016:134):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.2.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk meramal bagaimana keadaan atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2016:94).

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang menentukan apakah hipotesis ditolak atau diterima. Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen yaitu pengungkapan *sustainability report*, sehingga persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Pengungkapan *Sustainability Report*  
a : Konstanta  
b<sub>1</sub>-b<sub>3</sub> : Koefisien Regresi  
X<sub>1</sub> : Dewan Komisaris  
X<sub>2</sub> : Dewan Direksi  
X<sub>3</sub> : Komite Audit  
e : *Standard Error*

### 3.2.5.5 Uji Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2016:184). Dengan formulasi sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

- r<sub>xy</sub> : Koefisien antar X terhadap Y  
x : Variabel A  
y : Variabel B  
n : Jumlah Sampel

Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap hasil koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

**Tabel 3.10 Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

**Sumber: Sugiyono (2016:184)**

### 3.2.5.6 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:95). Nilai koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus:

$$K_d = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

$K_d$  : Koefisien Determinasi

$R^2$  : Koefisien Korelasi

### 3.2.5.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dibagi ke dalam 2 (dua) jenis pengujian, yaitu pengujian secara parsial yang disebut uji t (*t-test*) dan pengujian secara simultan yang disebut uji F (*F-test*).

## 1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada *output* hasil regresi menggunakan SPSS. Jika nilai probabilitas signifikansi  $t < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji t digunakan untuk membuktikan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah mekanisme *good corporate governance* (dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit), sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan *sustainability report*. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

### a. Perumusan Hipotesis

#### 1) Dewan Komisaris

$H_0$  : Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

$H_a$  : Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### 2) Dewan Direksi

$H_0$  : Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

$H_a$  : Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan

*sustainability report.*

3) Komite Audit

$H_0$  : Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report.*

$H_a$  : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report.*

b. Menentukan  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi

$t_{hitung}$  dan nilai signifikansi diperoleh dari hasil *output SPSS* pengujian secara parsial

c. Menentukan  $t_{tabel}$

Berdasarkan  $t_{tabel}$  statistik dengan signifikansi 0,05 atau 5% dengan derajat kebebasan  $(dk) = n-k-1$

d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan ketentuan berikut:

1) Kriteria uji untuk uji pihak kanan

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

2) Kriteria uji untuk uji pihak kiri

Jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melihat tingkat probabilitas yang diperoleh. Nilai probabilitas setiap koefisien regresi dibandingkan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima
  - 2) Jika nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_a$  diterima
- e. Pengambilan kesimpulan
- Dalam hal ini penelitian dinyatakan bahwa variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau dapat juga dinyatakan X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

## 2. Uji Simultan (*F-test*)

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut:

### a. Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh secara simultan antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y (variabel terikat). Dimana hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini.

$H_0$  : Mekanisme *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

$H_a$  : Mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

- b. Menentukan  $F_{hitung}$  dan nilai signifikansi

$F_{hitung}$  dan nilai signifikansi diperoleh dari hasil *output* SPSS pengujian secara simultan

- c. Menentukan  $F_{tabel}$

Berdasarkan  $F_{tabel}$  statistik dengan signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 2 (n-k-1)

- d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dengan ketentuan berikut:

- 1) Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Selain itu, dapat juga dilakukan dengan melihat tingkat probabilitas yang diperoleh. Nilai probabilitas setiap koefisien regresi dibandingkan dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika nilai signifikansi  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_a$  diterima

- e. Pengambilan kesimpulan

Dalam hal ini penelitian dinyatakan bahwa variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) atau dapat juga dinyatakan X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Uji secara simultan (Uji F) dimaksudkan untuk melihat pengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji simultan (uji F) digunakan untuk melihat besarnya pengaruh mekanisme *good corporate governance* (GCG) secara bersama-sama atau simultan terhadap

pengungkapan *sustainability report*. Penelitian ini menggunakan bantuan program *SPSS* versi 23 untuk melakukan seluruh pengolahan data yang diperlukan, demi menunjang hasil penelitian ini secara lengkap dan akurat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris, apakah terdapat Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2018. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 47 perusahaan, dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maka jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 7 perusahaan dari seluruh populasi. Data yang diperoleh merupakan data non keuangan yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan *sustainability report*. Sampel sebanyak 7 perusahaan dari 47 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Sektor Pertambangan  
yang menjadi Sampel Penelitian**

No	Kode	Nama Perusahaan	Sektor Industri	Sub Sektor
1.	ANTM	Aneka Tambang Tbk	Pertambangan	Logam dan Mineral Lainnya
2.	BUMI	Bumi Resources Tbk	Pertambangan	Batubara
3.	INCO	Vale Indonesia Tbk	Pertambangan	Logam dan Mineral Lainnya
4.	INDY	Indika Energy Tbk	Pertambangan	Batubara
5.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	Pertambangan	Batubara
6.	PTBA	Bukit Asam Tbk	Pertambangan	Batubara
7.	PTRO	Petrosea Tbk	Pertambangan	Batubara

**Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan diolah Peneliti, 2019**

Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif masing-masing variabel yang diteliti dan kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software SPSS window* versi 23.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang diklasifikasikan menjadi dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit, dan Pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.

#### **4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

##### **4.1.2.1 Deskripsi Dewan Komisaris Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Data dewan komisaris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2 Dewan Komisaris Perusahaan Sektor Pertambangan  
yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

NO	Kode Perusahaan	Jumlah Anggota Dewan Komisaris		
		2016	2017	2018
1.	ANTM	6	8	6
2.	BUMI	6	6	3
3.	INCO	2	5	6
4.	INDY	2	3	2
5.	ITMG	6	4	4
6.	PTBA	6	6	6
7.	PTRO	5	5	6
Nilai Maksimum		6,00	8,00	6,00
Nilai Minimum		2,00	3,00	2,00
Rata-rata		4,71	5,29	4,71

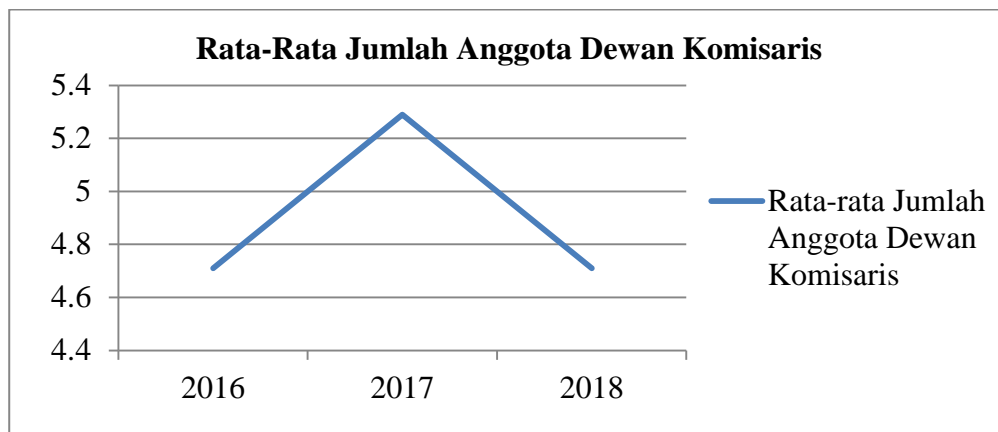
**Sumber: *Annual Report* dan diolah Peneliti, 2019**

Tabel 4.2 menunjukkan dewan komisaris yang diproksikan oleh jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sebesar 4,71, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan komisaris tertinggi adalah Aneka Tambang Tbk, Bumi Resources Tbk, Indo Tambangraya Megah Tbk dan Bukit Asam Tbk dengan nilai 6,00 atau 6. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan komisaris terendah adalah Vale Indonesia Tbk dan Indika Energy Tbk dengan nilai 2,00 atau 2.

Pada tahun 2017 rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sebesar 5,29, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan komisaris tertinggi adalah Aneka Tambang Tbk dengan nilai 8,00 atau 8. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan komisaris terendah adalah Indika Energy Tbk dengan nilai 3,00 atau 3.

Pada tahun 2018 rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sebesar 4,71, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan komisaris tertinggi adalah Aneka Tambang Tbk, Vale Indonesia Tbk, Bukit Asam Tbk dan Petrosea Tbk dengan nilai 6,00 atau 6. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan komisaris terendah adalah Indika Energy Tbk dengan nilai 2,00 atau 2.

Adapun rata-rata perkembangan jumlah anggota dewan komisaris dari 21 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



**Gambar 4.1 Grafik Rata-rata Jumlah Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**  
**Sumber: Data diolah Peneliti, 2019**

Gambar 4.1 menunjukkan rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sektor pertambangan pada periode 2016-2018. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sebesar 4,71, pada tahun 2017 jumlah anggota dewan komisaris mengalami peningkatan sebesar 0,58 menjadi 5,29 dan pada tahun 2018 jumlah anggota dewan komisaris mengalami penurunan sebesar 0,58 menjadi 4,71.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti menemukan bahwa selama tahun 2016-2018 rata-rata jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sampel mengalami fluktuasi. Fluktuasi jumlah anggota dewan komisaris ini dikarenakan terdapat penambahan dan pengurangan jumlah anggota dewan komisaris pada setiap perusahaan sampel. Penambahan jumlah anggota dewan komisaris terjadi karena adanya pengangkatan atau perekrutan anggota dewan komisaris yang baru. Sedangkan pengurangan jumlah anggota dewan komisaris terjadi karena adanya pemberhentian anggota dewan komisaris yang lama.

#### **4.1.2.2 Deskripsi Dewan Direksi Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

Menurut Nadapdap (2018:109), direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Data dewan direksi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3 Dewan Direksi Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

NO	Kode Perusahaan	Jumlah Anggota Dewan Direksi		
		2016	2017	2018
1.	ANTM	6	6	6
2.	BUMI	7	5	7
3.	INCO	3	4	4
4.	INDY	4	2	2
5.	ITMG	5	2	3
6.	PTBA	6	6	8
7.	PTRO	5	3	2

Nilai Maksimum	7,00	6,00	8,00
Nilai Minimum	3,00	2,00	2,00
Rata-rata	5,14	4,00	4,57

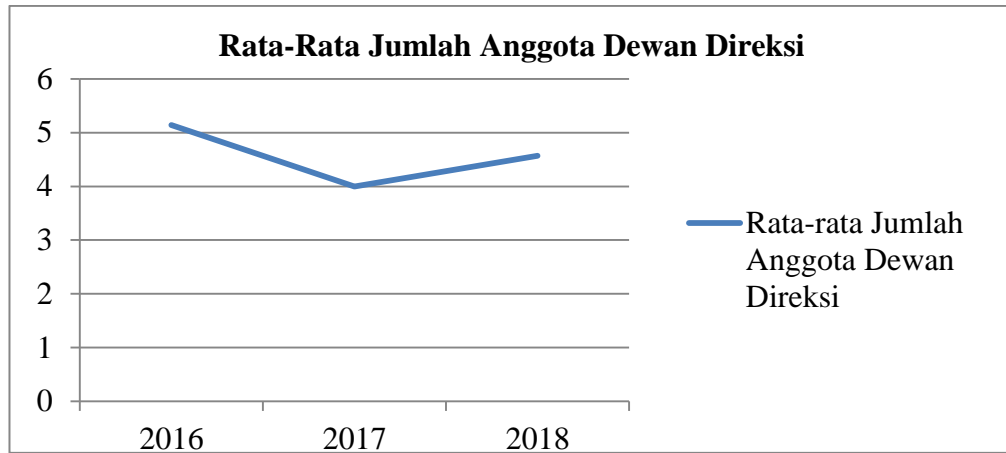
**Sumber: *Annual Report* dan diolah Peneliti, 2019**

Tabel 4.3 menunjukkan dewan direksi yang diprosikan oleh jumlah anggota dewan direksi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anggota dewan direksi perusahaan sebesar 5,14, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi tertinggi adalah Bumi Resources Tbk dengan nilai 7,00 atau 7. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi terendah adalah Vale Indonesia Tbk dengan nilai 3,00 atau 3.

Pada tahun 2017 rata-rata jumlah anggota dewan direksi perusahaan sebesar 4,00 atau 4, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi tertinggi adalah Aneka Tambang Tbk dan Bukit Asam Tbk dengan nilai 6,00 atau 6. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi terendah adalah Indika Energy Tbk dan Indo Tambangraya Megah Tbk dengan nilai 2,00 atau 2.

Pada tahun 2018 rata-rata jumlah anggota dewan direksi perusahaan sebesar 4,57, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi tertinggi adalah Bukit Asam Tbk dengan nilai 8,00 atau 8. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi terendah adalah Indika Energy Tbk dan Petrosea Tbk dengan nilai 2,00 atau 2.

Adapun rata-rata perkembangan jumlah anggota dewan direksi dari 21 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



**Gambar 4.2 Grafik Rata-rata Jumlah Anggota Dewan Direksi Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

**Sumber: Data diolah Peneliti, 2019**

Gambar 4.2 menunjukkan rata-rata jumlah anggota dewan direksi perusahaan sektor pertambangan pada periode 2016-2018. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anggota dewan direksi perusahaan sebesar 5,14, pada tahun 2017 jumlah anggota dewan direksi mengalami penurunan sebesar 1,14 menjadi 4,00 atau 4 dan pada tahun 2018 jumlah anggota dewan direksi mengalami peningkatan sebesar 0,57 menjadi 4,57.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti menemukan bahwa selama tahun 2016-2018 rata-rata jumlah anggota dewan direksi perusahaan sampel mengalami fluktuasi. Fluktuasi jumlah anggota dewan direksi ini dikarenakan terdapat penambahan dan pengurangan jumlah anggota dewan direksi pada setiap perusahaan sampel. Penambahan jumlah anggota dewan direksi terjadi karena adanya pengangkatan atau perekrutan anggota dewan direksi yang baru. Sedangkan pengurangan jumlah anggota dewan direksi terjadi karena adanya pemberhentian anggota dewan direksi yang lama.

#### 4.1.2.3 Deskripsi Komite Audit Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Data komite audit pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4.4 Komite Audit Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

NO	Kode Perusahaan	Jumlah Anggota Komite Audit		
		2016	2017	2018
1.	ANTM	5	5	4
2.	BUMI	6	4	2
3.	INCO	3	4	4
4.	INDY	4	2	2
5.	ITMG	5	3	3
6.	PTBA	6	4	7
7.	PTRO	3	3	5
Nilai Maksimum		6,00	5,00	7,00
Nilai Minimum		3,00	2,00	2,00
Rata-rata		4,57	3,57	3,86

**Sumber: Annual Report dan diolah Peneliti, 2019**

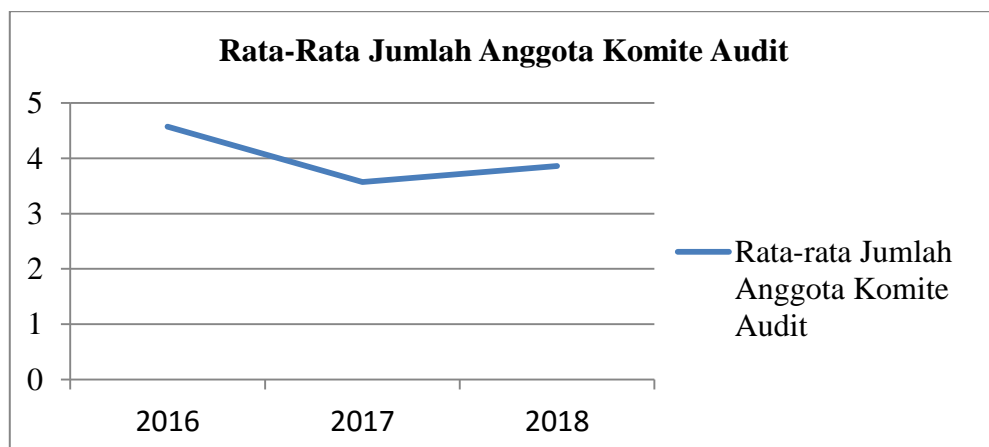
Tabel 4.4 menunjukkan komite audit yang diprosikan oleh jumlah anggota komite audit perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan sebesar 4,57, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota komite audit tertinggi adalah Bumi Resources Tbk dan Bukit Asam Tbk dengan nilai 6,00 atau 6. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah

anggota komite audit terendah adalah Vale Indonesia Tbk dan Petrosea Tbk dengan nilai 3,00 atau 3.

Pada tahun 2017 rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan sebesar 3,57, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota komite audit tertinggi adalah Aneka Tambang Tbk dengan nilai 5,00 atau 5. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota komite audit terendah adalah Indika Energy Tbk dengan nilai 2,00 atau 2.

Pada tahun 2018 rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan sebesar 3,86, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota komite audit tertinggi adalah Bukit Asam Tbk dengan nilai 7,00 atau 7. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota komite audit terendah adalah Bumi Resources Tbk dan Indika Energy Tbk dengan nilai 2,00 atau 2.

Adapun rata-rata perkembangan jumlah anggota komite audit dari 21 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



**Gambar 4.3 Grafik Rata-rata Jumlah Anggota Komite Audit Perusahaan Sektor Pertambangan yang Tendaftar di BEI Periode 2016-2018**

**Sumber: Data diolah Peneliti, 2019**

Gambar 4.3 menunjukkan rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan sektor pertambangan pada periode 2016-2018. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan sebesar 4,57, pada tahun 2017 jumlah anggota komite audit mengalami penurunan sebesar 1,00 menjadi 3,57 dan pada tahun 2018 jumlah anggota komite audit mengalami peningkatan sebesar 0,29 menjadi 3,86.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti menemukan bahwa selama tahun 2016-2018 rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan sampel mengalami fluktuasi. Fluktuasi jumlah anggota komite audit ini dikarenakan terdapat penambahan dan pengurangan jumlah anggota komite audit pada setiap perusahaan sampel. Penambahan jumlah anggota komite audit terjadi karena adanya pengangkatan atau perekrutan anggota komite audit yang baru. Sedangkan pengurangan jumlah anggota komite audit terjadi karena adanya pemberhentian anggota komite audit yang lama.

#### **4.1.2.4 Deskripsi Pengungkapan *Sustainability Report* Perusahaan Sektor**

##### **Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

Menurut Lako (2015:128), *sustainability report* merupakan model pelaporan informasi korporasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dengan pelaporan sosial (*social reporting*), pelaporan lingkungan (*environment reporting*) dan pelaporan tata kelola korporasi (*corporate governance reporting*) secara terpadu dalam satu paket pelaporan. Sebagian besar bentuk pengungkapan *sustainability report* perusahaan diungkapkan melalui *website* perusahaan, dengan

media ini siapa saja dapat mengakses sehingga mereka mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan pengamatan, *sustainability report* mengandung *narrative text*, foto, tabel dan grafik yang memuat penjelasan mengenai pelaksanaan *sustainability* perusahaan. Berikut disajikan Pengungkapan *Sustainability Report* yang diprosikan oleh *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

**Tabel 4.5 Pengungkapan *Sustainability Report* (*Sustainability Report Disclosure Index*) Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018**

NO	Kode Perusahaan	<i>Sustainability Report Disclosure Index (SRDI)</i>		
		2016	2017	2018
1.	ANTM	0,403	0,455	0,416
2.	BUMI	0,558	0,208	0,273
3.	INCO	0,104	0,169	0,403
4.	INDY	0,143	0,117	0,117
5.	ITMG	0,299	0,156	0,130
6.	PTBA	0,532	0,377	0,714
7.	PTRO	0,286	0,338	0,403
Nilai Maksimum		0,558	0,455	0,714
Nilai Minimum		0,104	0,117	0,117
Rata-rata		0,332	0,260	0,351

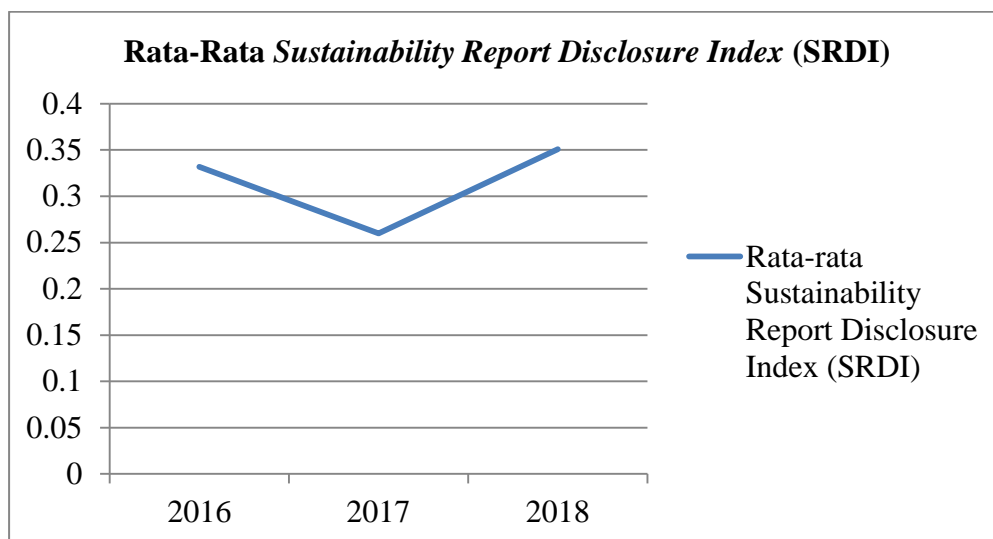
**Sumber: *Sustainability Report* dan diolah Peneliti, 2019**

Tabel 4.5 menunjukkan pengungkapan *sustainability report* yang diprosikan oleh *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 rata-rata SRDI perusahaan sebesar 0,332, perusahaan yang memiliki tingkat SRDI tertinggi adalah Bumi Resources Tbk dengan nilai 0,558. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat SRDI terendah adalah Vale Indonesia Tbk dengan nilai 0,104.

Pada tahun 2017 rata-rata SRDI perusahaan sebesar 0,260. perusahaan yang memiliki tingkat SRDI tertinggi adalah Aneka Tambang Tbk dengan nilai 0,455. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat SRDI terendah adalah Indika Energy Tbk dengan nilai 0,117.

Pada tahun 2018 rata-rata SRDI perusahaan sebesar 0,351, perusahaan yang memiliki tingkat SRDI tertinggi adalah Bukit Asam Tbk dengan nilai 0,714. Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat SRDI terendah adalah Indika Energy Tbk dengan nilai 0,117.

Adapun rata-rata perkembangan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) dari 21 sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



**Gambar 4.4** Grafik Rata-rata *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016- 2018

**Sumber:** Data diolah Peneliti, 2019

Gambar 4.4 menunjukkan rata-rata pengungkapan *sustainability report* (SRDI) perusahaan sektor pertambangan pada periode 2016-2018. Pada tahun 2016 rata-rata SRDI perusahaan sebesar 0,332, pada tahun 2017 SRDI mengalami

penurunan sebesar 0,072 menjadi 0,260 dan pada tahun 2018 SRDI mengalami peningkatan sebesar 0,091 menjadi 0,351.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti menemukan bahwa selama tahun 2016-2018 rata-rata pengungkapan *sustainability report* (SRDI) perusahaan sampel mengalami fluktuasi. Fluktuasi nilai SRDI ini dikarenakan jumlah indeks pengungkapan setiap indikator *GRI standards* (2016) pada setiap perusahaan sampel. Pada tahun 2016-2017 rata-rata SRDI mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa terdapat indeks pengungkapan *sustainability report* 2016 yang tidak diungkapkan dalam *sustainability report* 2017. Sebaliknya, pada tahun 2017-2018 rata-rata SRDI mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa terdapat indeks pengungkapan *sustainability report* yang tidak diungkapkan dalam *sustainability report* 2017 diungkapkan dalam *sustainability report* 2018.

#### **4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017:147-148).

Analisis statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari variabel dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit sebagai variabel independen dan pengungkapan *sustainability report* sebagai variabel dependen. Berdasarkan analisis statistik deskriptif dengan menggunakan program *SPSS 23.0* diperoleh gambaran sampel yang disajikan pada tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Dewan Komisaris (X1)	21	2.00	8.00	4.9048	1.67047
Dewan Direksi (X2)	21	2.00	8.00	4.5714	1.85934
Komite Audit (X3)	21	2.00	7.00	4.0000	1.37840
Pengungkapan Sustainability Report (Y)	21	.10	.71	.3142	.16896
Valid N (listwise)	21				

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dijelaskan hasil pengujian statistik deskriptif yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Dewan Komisaris menunjukkan nilai minimum sebesar 2,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 8,00. Dengan nilai rata-rata 4,90 yang merupakan nilai rata rata ukuran dewan komisaris 21 sampel selama periode 2016-2018 dan standar deviasi 1,67 yang merupakan standar deviasi 21 sampel selama periode 2016-2018.
2. Variabel Dewan Direksi menunjukkan nilai minimum sebesar 2,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 8,00. Dengan nilai rata-rata 4,57 yang merupakan nilai rata rata jumlah anggota dewan direksi 21 sampel selama periode 2016-2018 dan standar deviasi 1,86 yang merupakan standar deviasi 21 sampel selama periode 2016-2018.
3. Variabel Komite Audit menunjukkan nilai minimum sebesar 2,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 7,00. Dengan nilai rata-rata 4,00 yang merupakan nilai rata-rata ukuran komite audit 21 sampel selama periode 2016-2018 dan standar deviasi 1,38 yang merupakan standar deviasi 21 sampel selama periode 2016-2018.

4. Variabel Pengungkapan *Sustainability Report* menunjukkan nilai minimum SRDI sebesar 0,10, sedangkan nilai maksimum SRDI sebesar 0,71. Dengan nilai rata-rata 0,31 yang merupakan nilai rata-rata SRDI 21 sampel selama periode 2016-2018 dan standar deviasi 0,17 yang merupakan standar deviasi 21 sampel selama periode 2016-2018.

#### **4.1.4 Uji Asumsi Klasik**

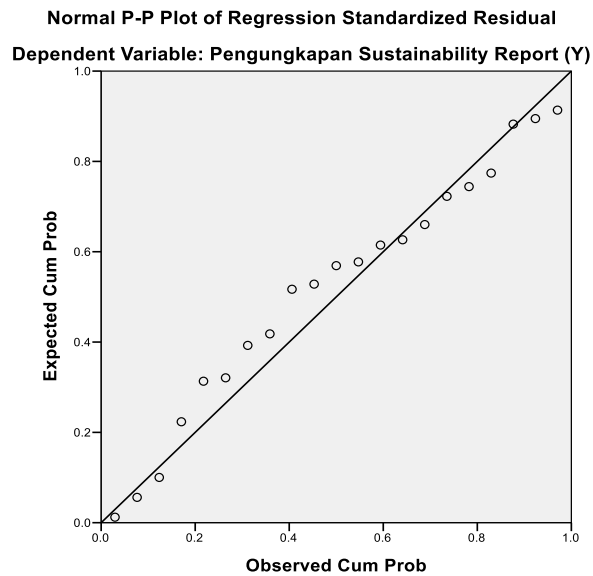
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS) (Sunjoyo *et al.*, 2013). Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar mampu memberikan estimasi yang handal dan tidak bias. Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang akan digunakan adalah uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

##### **4.1.4.1 Uji Normalitas**

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2016:156). Dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



**Gambar 4.5 Hasil P-Plot Uji Normalitas**

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Berdasarkan gambar 4.5 tersebut menunjukkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas, yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal.

Menurut Ghozali (2016:156), uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu, uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis:

$H_0$  : Data residual berdistribusi normal

$H_a$  : Data residual berdistribusi tidak normal

Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya, dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

3. Jika nilai probabilitas (sig.) < 0,05 maka data residual terdistribusi secara tidak normal ( $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima).
4. Jika nilai probabilitas (sig.) > 0,05 maka data residual terdistribusi secara normal ( $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak).

**Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09428207
Most Extreme Differences	Absolute	.137
	Positive	.070
	Negative	-.137
Test Statistic		.137
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Berdasarkan tabel 4.7, peneliti menemukan nilai signifikansi hitung untuk *one-sample kolmogorov smirnov test* sebesar 0,200. Dimana 0,200 menunjukkan bahwa nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05, maka hipotesis nol diterima yang berarti bahwa data residual terdistribusi normal.

#### 4.1.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2016:103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ada tidaknya gejala multikolonieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) dan toleransinya.

*Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan ada multikolonieritas adalah nilai  $tolerance \leq 0,10$  atau sama dengan  $VIF \geq 10$ . Model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terdapat masalah multikolonieritas atau adanya hubungan korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016:103-104). Dengan menggunakan program *SPSS 23.0 for Windows*, didapat *output* nilai *VIF* untuk masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dewan Komisaris (X1)	.822	1.216
	Dewan Direksi (X2)	.866	1.155
	Komite Audit (X3)	.851	1.176

a. Dependent Variable: Pengungkapan Sustainability Report (Y)

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolonieritas. Hal ini tampak pada nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 10 persen (0,10). Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi tersebut.

#### 4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi (Ghozali, 2016:106). Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (*DW test*) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson**

Kesimpulan	Jika
Terdapat autokorelasi positif	$d < d_L$
Ragu-ragu	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak terdapat autokorelasi	$d_U \leq d \leq 4-d_U$
Ragu-ragu	$4-d_U \leq d \leq 4-d_L$
Terdapat autokorelasi negatif	$d > 4-d_L$

**Sumber : Ghozali (2016:107)**

Nilai  $d_U$  dan  $d_L$  dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi atau tidak, dapat kita lihat dalam tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

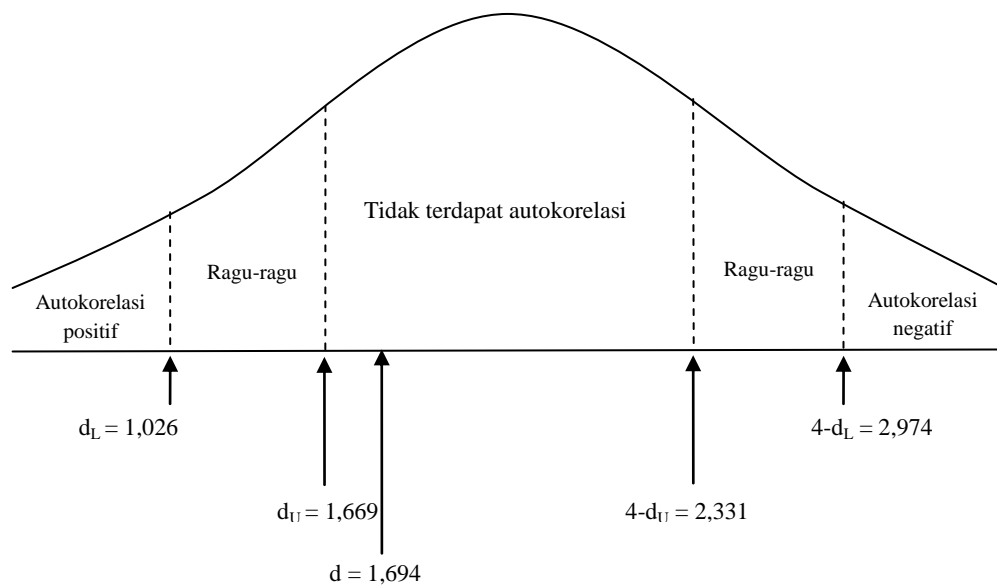
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.830 <sup>a</sup>	.689	.634	.10226	1.694

a. Predictors: (Constant), Komite Audit (X3), Dewan Direksi (X2), Dewan Komisaris (X1)

b. Dependent Variable: Pengungkapan Sustainability Report (Y)

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Hasil keputusan uji dapat dilihat dari gambar berikut:



**Gambar 4.6 Kurva Pengujian Autokorelasi**

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

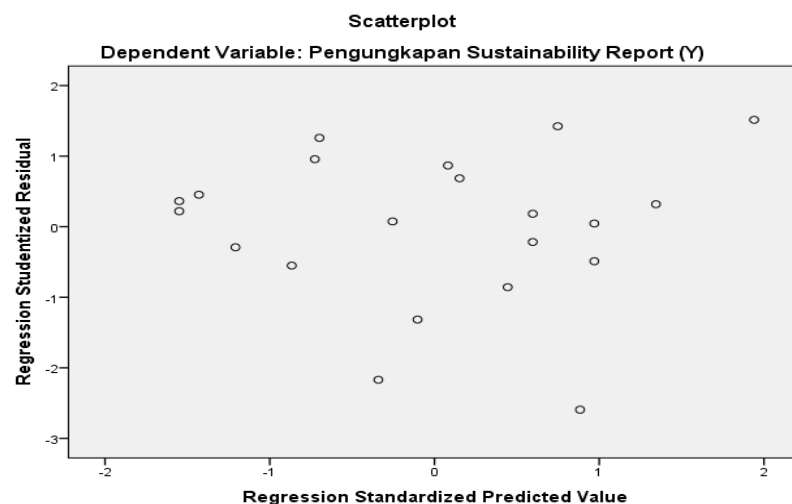
Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji autokorelasi menunjukkan angka Durbin Watson sebesar 1,694. Nilai ini akan dibandingkan dengan tabel DW dengan jumlah observasi (n)=21 jumlah variabel independen (k)=3 dan tingkat signifikansi 0,05 di dapat nilai  $d_U=1,669$ . Oleh karena  $DW=1,694$  berada diatas nilai  $d_U=1,669$  namun dibawah nilai  $4-d_U= 2,331$  yaitu ( $1,669 < 1,694 < 2,331$ ), karena DW berada di antara nilai  $d_U$  dan  $4-d_U$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada gejala autokorelasi positif dan negatif pada model regresi.

#### 4.1.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Deteksi dilakukan dengan melihat Grafik Plot dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2016:134):

- c. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- d. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan melalui gambar 4.7 berikut:



**Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Berdasarkan diagram sebar (*scatterplot*) yang ditunjukkan pada gambar 4.7, terlihat bahwa plot yang terbentuk tidak memiliki pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit merupakan variabel independen, sedangkan pengungkapan *sustainability report* sebagai variabel dependen. Model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel Dependen (Pengungkapan *Sustainability Report*)
- a : Konstanta
- b<sub>1</sub>-b<sub>3</sub> : Koefisien Regresi
- X : Variabel Independen (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite Audit)
- e : *Standard Error*

Dengan menggunakan program SPSS 23.0 *for windows*, maka diperoleh hasil koefisien regresi. Rangkuman hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut:

**Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Correlations		
		B	Std. Error	Beta	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	-.213	.089				
	Dewan Komisaris (X1)	.036	.015	.353	.613	.498	.320
	Dewan Direksi (X2)	.031	.013	.343	.574	.496	.319
	Komite Audit (X3)	.052	.018	.428	.644	.577	.395

a. Dependent Variable: Pengungkapan Sustainability Report (Y)

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Berdasarkan tabel 4.11 pada kolom B, tercantum nilai konstanta dan nilai koefisien regresi linear berganda untuk variabel bebas. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka dapat ditentukan model regresi linear berganda yang dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = -a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$SRDI = -0,213 + 0,036X_1 + 0,031X_2 + 0,052X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -0,213, artinya apabila variabel independen yaitu dewan komisaris, direksi dan komite audit dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu pengungkapan *sustainability report* akan mengalami penurunan sebesar 0,213 satuan.
2. Dewan komisaris sebesar 0,036, artinya apabila variabel dewan komisaris mengalami kenaikan (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap

konstan, maka variabel dependen yaitu pengungkapan *sustainability report* akan mengalami kenaikan sebesar 0,036.

3. Dewan direksi sebesar 0,031, artinya apabila variabel dewan direksi mengalami kenaikan (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu pengungkapan *sustainability report* akan mengalami kenaikan sebesar 0,031.
4. Komite audit sebesar 0,052 artinya apabila variabel komite audit mengalami kenaikan (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka variabel dependen yaitu pengungkapan *sustainability report* akan mengalami kenaikan sebesar 0,052.

#### 4.1.6 Pengujian Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen serta mempunyai tujuan untuk meyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2016:184). Dalam penelitian ini menggunakan dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit sebagai variabel independen, dan pengungkapan *sustainability report* sebagai variabel dependen. Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap hasil koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut:

**Tabel 4.12 Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat kuat

**Sumber: Sugiyono (2016:184)**

Dengan menggunakan program SPSS 23.0 *for windows*, maka diperoleh hasil koefisien korelasi. Adapun hasil uji koefisien korelasi (R) ditampilkan dalam Tabel 4.13 berikut:

**Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Korelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.830 <sup>a</sup>	.689	.634	.10226	1.694

a. Predictors: (Constant), Komite Audit (X3), Dewan Direksi (X2), Dewan Komisaris (X1)

b. Dependent Variable: Pengungkapan Sustainability Report (Y)

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,830. Hal ini berarti bahwa hubungan dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report* adalah sebesar 0,830. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel dewan komisaris, direksi dan komite audit memiliki tingkat hubungan sangat kuat terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **4.1.7 Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan model regresi dalam menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit sebagai variabel independen, dan pengungkapan *sustainability report* sebagai variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi ditampilkan dalam tabel 4.14 berikut:

**Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.830 <sup>a</sup>	.689	.634	.10226	1.694

a. Predictors: (Constant), Komite Audit (X3), Dewan Direksi (X2), Dewan Komisaris (X1)

b. Dependent Variable: Pengungkapan Sustainability Report (Y)

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

$$\begin{aligned}K_d &= R^2 \times 100\% \\&= (0,830)^2 \times 100\% \\&= 0,6889 \times 100\% \\&= 68,89\% \\&= 68,90\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi di atas, terhat bahwa nilai *R square* yaitu sebesar 0,689. Dalam hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit sebesar 68,9%. Sementara sisanya yaitu 31,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model penelitian ini.

#### **4.1.8 Pengujian Hipotesis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti telah menetapkan hipotesis penelitian baik secara parsial, maupun secara gabungan/simultan. Dalam bagian ini, peneliti akan menguji hipotesis yang telah dibuat.

##### **4.1.8.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial dari variabel independen yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit

terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan *sustainability report*. Hasil yang diperoleh dari pengujian secara parsial disajikan pada tabel 4.15 berikut:

**Tabel 4.15 Hasil Uji Parsial (Uji t)  
Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)  
Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-.213	.089		-2.393	.029
	Dewan Komisaris (X1)	.036	.015	.353	2.366	.030
	Dewan Direksi (X2)	.031	.013	.343	2.356	.031
	Komite Audit (X3)	.052	.018	.428	2.915	.010

a. Dependent Variable: Pengungkapan Sustainability Report (Y)

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

**1. Pengujian Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

a. Perumusan Hipotesis

$H_0$  : Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

$H_a$  : Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

b. Menentukan  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi

Berdasarkan tabel 4.15, di dapat  $t_{hitung}$  sebesar 2,366 dan signifikansi sebesar 0,030.

c. Menentukan  $t_{tabel}$

Berdasarkan  $t_{tabel}$  statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (df) =  $n-k-1$  atau  $21-3-1 = 17$ , hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,110.

d. Kriteria pengujian:

3) Kriteria uji untuk uji pihak kanan

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

4) Kriteria uji untuk uji pihak kiri

Jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan signifikansi:

1) Jika nilai signifikansi  $> \alpha=0,05$  maka  $H_0$  diterima

2) Jika nilai signifikansi  $< \alpha=0,05$  maka  $H_a$  diterima

e. Pengambilan kesimpulan

Berdasarkan tabel 4.15 hasil pengujian hipotesis secara parsial, peneliti menemukan nilai signifikansi indikator dewan komisaris sebesar  $0,030 < 0,05$ . Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perhitungan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,366 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,110. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,366 > 2,110$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## 2. Pengujian Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

### a. Perumusan Hipotesis

$H_0$  : Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

$H_a$  : Dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

### b. Menentukan $t_{hitung}$ dan nilai signifikansi

Berdasarkan tabel 4.15, di dapat  $t_{hitung}$  sebesar 2,356 dan signifikansi sebesar 0,031.

### c. Menentukan $t_{tabel}$

Berdasarkan  $t_{tabel}$  statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-k-1$  atau  $21-3-1 = 17$ , hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,110.

### d. Kriteria pengujian:

#### 1) Kriteria uji untuk uji pihak kanan

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

#### 2) Kriteria uji untuk uji pihak kiri

Jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan signifikansi:

1) Jika nilai signifikansi  $> \alpha=0,05$  maka  $H_0$  diterima

2) Jika nilai signifikansi  $< \alpha=0,05$  maka  $H_a$  diterima

e. Pengambilan kesimpulan

Berdasarkan Tabel 4.15 hasil pengujian hipotesis secara parsial, peneliti menemukan nilai signifikansi indikator dewan direksi sebesar  $0,031 < 0,05$ . Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perhitungan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,356 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,110. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,256 > 2,110$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

**3. Pengujian Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

a. Perumusan Hipotesis

$H_0$  : Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

$H_a$  : Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

b. Menentukan  $t_{hitung}$  dan nilai signifikansi

Berdasarkan tabel 4.15, di dapat  $t_{hitung}$  sebesar 2,915 dan signifikansi sebesar 0,010.

c. Menentukan  $t_{tabel}$

Berdasarkan  $t_{tabel}$  statistik dengan signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-k-1$  atau  $21-3-1 = 17$ , hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,110.

d. Kriteria pengujian:

1) Kriteria uji untuk uji pihak kanan

Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

2) Kriteria uji untuk uji pihak kiri

Jika  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Jika  $-t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Berdasarkan signifikansi:

1) Jika nilai signifikansi  $> \alpha=0,05$  maka  $H_0$  diterima

2) Jika nilai signifikansi  $< \alpha=0,05$  maka  $H_a$  diterima

e. Pengambilan kesimpulan

Berdasarkan tabel 4.15 hasil pengujian hipotesis secara parsial, peneliti menemukan nilai signifikansi indikator komite audit sebesar  $0,010 < 0,05$ . Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perhitungan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,915 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,110. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,915 > 2,110$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya secara parsial komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **4.1.8.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap

variabel dependen yang diuji. Hasil yang diperoleh dari pengujian secara simultan disajikan pada tabel 4.16 berikut:

**Tabel 4.16 Hasil Uji Simultan (Uji F)  
Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)  
Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

**Anova<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.393	3	.131	12.532	.000 <sup>b</sup>
	Residual	.178	17	.010		
	Total	.571	20			

a. Dependent Variable: Pengungkapan Sustainability Report (Y)

b. Predictors: (Constant), Komite Audit (X3), Dewan Direksi (X2), Dewan Komisaris (X1)

**Sumber: Output SPSS 23.0, 2019**

**1. Pengaruh Simultan Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG)  
Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report***

a. Perumusan Hipotesis

$H_0$  : Mekanime *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

$H_a$  : Mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

b. Menentukan  $F_{hitung}$  dan nilai signifikansi

Berdasarkan tabel 4.16, di dapat  $F_{hitung}$  sebesar 12,532 dan signifikansi sebesar 0,000.

c. Menentukan  $F_{tabel}$

Berdasarkan  $F_{tabel}$  statistik dengan signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df 2 (n-k-1) atau 21-3-1 = 17, hasil diperoleh untuk  $F_{tabel}$  sebesar 3,197.

d. Kriteria pengujian:

- 3) Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima
- 4) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

Berdasarkan signifikansi:

- 1) Jika nilai signifikansi  $> \alpha=0,05$  maka  $H_0$  diterima
- 2) Jika nilai signifikansi  $< \alpha=0,05$  maka  $H_a$  diterima

e. Pengambilan kesimpulan

Berdasarkan tabel 4.16 hasil pengujian hipotesis secara simultan, peneliti menemukan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perhitungan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yang menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 12,532 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,197. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $12,532 > 3,197$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak, artinya secara simultan mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan

#### Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penerapan GCG dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan perusahaan dan akan memberikan kontribusi serta nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham, pegawai dan *stakeholder* lainnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penerapan GCG tidak hanya mendukung upaya perusahaan dalam mencapai tujuannya, namun juga turut memaksimalkan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi pemangku kepentingan yang lain. Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, sesuai dengan prinsip GCG yaitu transparansi, perusahaan dituntut untuk dapat mengungkapkan semua informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Informasi keuangan diungkapkan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan, sementara informasi non-keuangan berupa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Bagi perusahaan sektor pertambangan, terdapat beberapa tujuan dari adanya penerapan GCG ini, antara lain yaitu mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan perusahaan, mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara direksi, dewan komisaris dan seluruh *stakeholders* perusahaan, memperbaiki budaya kerja perusahaan sehingga pengelolaan sumber daya menjadi lebih amanah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* serta mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal bagi seluruh *stakeholder* perusahaan, serta memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tepat, yang sudah menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik.

Dalam pelaksanaannya, *good corporate governance* (GCG) memiliki mekanismenya sendiri. terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi, serta organ perusahaan

lain yang membantu terwujudnya GCG, seperti sekretaris perusahaan, komite audit dan komite-komite lain yang mendukung pelaksanaan GCG. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) mekanisme GCG, yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit.

#### **4.2.1.1 Dewan Komisaris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang**

##### **Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Pada perusahaan sektor pertambangan, dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemantauan efektivitas pelaksanaan GCG. Selain itu, dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan pada umumnya serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan, termasuk memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 4.2 menunjukkan dewan komisaris yang diprosikan oleh ukuran dewan komisaris perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018. Berdasarkan tabel tersebut, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perusahaan yang memiliki tingkat ukuran dewan komisaris tertinggi adalah Aneka Tambang Tbk pada tahun 2017. Anggota dewan komisaris Aneka Tambang Tbk per 31 Desember 2017 berjumlah 8 (delapan) orang yang merupakan jumlah tertinggi selama periode 2016-2018. Sedangkan, perusahaan yang memiliki tingkat ukuran dewan komisaris terendah adalah Vale Indonesia Tbk pada tahun 2016 dan tahun 2018. Anggota dewan komisaris Vale Indonesia Tbk per 31 Desember 2016 berjumlah 2 (dua) orang dan per 31 Desember 2018

berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan jumlah terendah selama periode 2016-2018. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dengan demikian, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap jalannya perusahaan berjalan dengan baik begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap jalannya perusahaan tidak berjalan dengan baik.

Komposisi dan jumlah anggota dewan komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi dan rencana strategis perusahaan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.

#### **4.2.2.2 Dewan Direksi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang**

##### **Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Menurut Nadapdap (2018:109), direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pada perusahaan sektor pertambangan, dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Tabel 4.3 menunjukkan dewan direksi yang diproksikan oleh jumlah anggota dewan direksi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018. Berdasarkan tabel tersebut, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi tertinggi adalah Bukit Asam Tbk pada tahun 2018. Anggota dewan direksi Bukit Asam Tbk per 31 Desember 2018 berjumlah 8 (delapan) orang yang merupakan jumlah tertinggi selama periode 2016-2018. Sedangkan, perusahaan yang memiliki tingkat jumlah anggota dewan direksi terendah adalah Indika Energy Tbk pada tahun 2017 dan tahun 2018. Anggota dewan direksi Indika Energy Tbk per 31 Desember 2017 berjumlah 2 (dua) orang dan per 31 Desember 2018 berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan jumlah terendah selama periode 2016-2018. Dewan direksi merupakan pusat sistem *good corporate governance* yang berperan dalam mengelola perusahaan demi terciptanya kelangsungan jangka panjang perusahaan. Dengan wewenang yang dimilikinya, dewan direksi dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan yang cukup kuat untuk menghasilkan nilai tambah perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha. Dengan demikian, semakin banyak jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka pengurusan perusahaan berjalan dengan baik begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka pengurusan perusahaan tidak berjalan dengan baik.

Komposisi dan jumlah anggota dewan direksi ditetapkan oleh RUPS agar dapat melaksanakan pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif dan responsif pada setiap kondisi operasional dengan mempertimbangkan segala risiko secara independen.

#### **4.2.2.3 Komite Audit pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

Pada perusahaan sektor pertambangan, komite audit merupakan alat kelengkapan dewan komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, audit internal dan proses pelaporan keuangan sehingga perusahaan dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Tabel 4.4 menunjukkan komite audit yang diprosikan oleh ukuran komite audit perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018. Berdasarkan tabel tersebut, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perusahaan yang memiliki tingkat ukuran komite audit tertinggi adalah Bukit Asam Tbk pada tahun 2018. Anggota komite audit Bukit Asam Tbk per 31 Desember 2018 berjumlah 7 (tujuh) orang yang merupakan jumlah tertinggi selama periode 2016-2018. Sedangkan, perusahaan yang memiliki tingkat ukuran komite audit terendah adalah Indika Energy Tbk pada tahun 2017 dan tahun 2018. Anggota komite audit Indika Energy Tbk per 31 Desember 2017 berjumlah 2 (dua) orang dan per 31 Desember 2018 berjumlah 2 (dua) orang yang merupakan jumlah terendah selama periode 2016-2018. Komite audit merupakan organisasi yang mampu mendorong diterapkannya *good corporate governance* (GCG) di Indonesia. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengawasan internal perusahaan berjalan dengan baik begitupun sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengawasan internal perusahaan tidak berjalan dengan baik.

Seluruh anggota komite audit tidak memiliki afiliasi dengan dewan direksi, dewan komisaris maupun pemegang saham. Anggota komite audit tidak memiliki wewenang untuk merancang, memimpin maupun mengendalikan perusahaan. Dengan demikian, seluruh persyaratan independensi anggota komite audit sesuai dengan peraturan dan kaidah praktik GCG.

#### **4.2.2 Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor**

##### **Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

*Sustainability report* adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi keuangan (*financial*) tetapi juga memuat informasi non-keuangan (*non-financial*) yang dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

Bagi perusahaan sektor pertambangan, *sustainability report* merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh *stakeholder* sekaligus merupakan representasi peran aktif perusahaan dalam kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan sebagai bagian dari *global citizen* untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi semua pihak.

Tabel 4.5 menunjukkan pengungkapan *sustainability report* yang diprosikan oleh *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2016-2018. Berdasarkan tabel tersebut, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, perusahaan yang memiliki tingkat SRDI tertinggi adalah Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 dengan nilai 0,714 yang merupakan jumlah tertinggi selama periode 2016-2018. Sedangkan, perusahaan yang memiliki tingkat SRDI terendah adalah Indika Energy Tbk pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan nilai 0,117 yang merupakan jumlah terendah selama periode 2016-2018. Dengan menyusun *sustainability report*, maka pemakai informasi mengetahui apakah perusahaan transparan dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada lingkungan, manajemen, karyawan, masyarakat dan alam, pengaruh proses produksi atau aktivitas perusahaan terhadap lingkungan dan sejauh mana perusahaan mengomunikasikan hal tersebut kepada publik serta apakah perusahaan jujur terhadap diri mereka sendiri dan terhadap lingkungan. Bagi perusahaan sektor pertambangan, pengungkapan *sustainability report* bertujuan untuk mengkomunikasikan secara transparan dan akuntabel mengenai kinerja keberlanjutan perusahaan dalam bidang ekonomi, sosial dan lingkungan demi memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*. Dengan menyusun *sustainability report*, maka perusahaan dapat mengurangi risikonya baik risiko bisnis, risiko keuangan dan risiko pasar korporasi, selain itu, nilai perusahaan terkait isu sosial dan lingkungan menjadi meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata para *stakeholder* sehingga akan menambah kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan.

*Sustainability report* disusun sesuai dengan *GRI standards* 2016, dimana standar ini merupakan standar internasional *sustainability reporting* versi terbaru yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Untuk memudahkan para pengguna menemukan *GRI standards* yang diterapkan, maka dalam *sustainability report* perlu dicantumkan *disclosure GRI standards* di dalam tanda kurung pada setiap penjelasan yang relevan. Untuk menghasilkan *sustainability report* yang berkualitas, maka perusahaan akan berupaya untuk menyampaikan semua informasi yang perlu diungkapkan, seperti pengungkapan yang ditentukan dalam *GRI standards* 2016.

#### **4.2.3 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)**

##### **4.2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* Perusahaan Sektor Pertambangan**

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Undang-Undang No. 40 tahun 2007). Untuk mengukur tingkat dewan komisaris perusahaan, dapat dilakukan dengan menggunakan indikator ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansi uji statistik (*p-value*) untuk variabel  $X_1$  sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,05 ( $0,030 < 0,05$ ). Selain itu dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,366 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,110. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,366 > 2,110$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, artinya secara parsial dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengawasan akan berjalan dengan baik dan pengungkapan *sustainability report* semakin luas (Nugroho, 2011).

Data yang mendukung hasil penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 4.17 berikut:

**Tabel 4.17 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan**

NO	Perusahaan	Tahun	Dewan Komisaris ( $X_1$ )	SRDI (Y)
1	ANTM	2016	6	0.403
2	ANTM	2017	8	0.455
3	ANTM	2018	6	0.416
4	BUMI	2016	6	0.558
5	BUMI	2017	6	0.208
6	BUMI	2018	3	0.273

7	INCO	2016	2	0.104
8	INCO	2017	5	0.169
9	INCO	2018	6	0.403
10	INDY	2016	2	0.143
11	INDY	2017	3	0.117
12	INDY	2018	2	0.117
13	ITMG	2016	6	0.299
14	ITMG	2017	4	0.156
15	ITMG	2018	4	0.130
16	PTBA	2016	6	0.532
17	PTBA	2017	6	0.377
18	PTBA	2018	6	0.714
19	PTRO	2016	5	0.286
20	PTRO	2017	5	0.338
21	PTRO	2018	6	0.403

**Sumber: *Annual Report dan Sustainability Report***

**Data diolah Peneliti, 2019**

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan *sustainability report* pun semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.403 pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 8 (delapan) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.455. Bumi Resources Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.558 pada tahun 2016. Vale Indonesia Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.169 pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.403. Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.299 pada tahun 2016. Bukit Asam Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.532 pada

tahun 2016. Petrosea Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.403 pada tahun 2018.

Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan *sustainability report* pun kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.416 pada tahun 2018. Vale Indonesia Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 2 (dua) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.104 pada tahun 2016. Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 2 (dua) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.117 pada tahun 2018. Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.156 pada tahun 2017.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) dan Waryanto (2010) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **4.2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* Perusahaan Sektor Pertambangan**

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Nadapdap, 2018:109). Untuk mengukur tingkat dewan direksi perusahaan, dapat dilakukan dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansi uji statistik (*p-value*) untuk variabel  $X_2$  adalah

sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05 ( $0,031 < 0,05$ ), selain itu dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,356 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,110. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,356 > 2,110$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, artinya secara parsial dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Dewan direksi merupakan pusat sistem *good corporate governance* yang berperan dalam mengelola perusahaan demi terciptanya kelangsungan jangka panjang dari perusahaan. Dengan wewenang yang dimilikinya, dewan direksi dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas, sehingga perusahaan yang memiliki jumlah anggota dewan direksi yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan *sustainability report*.

Data yang mendukung hasil penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 4.18 berikut:

**Tabel 4.18 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan**

NO	Perusahaan	Tahun	Dewan Direksi ( $X_2$ )	SRDI (Y)
1	ANTM	2016	6	0.403
2	ANTM	2017	6	0.455
3	ANTM	2018	6	0.416
4	BUMI	2016	7	0.558
5	BUMI	2017	5	0.208
6	BUMI	2018	7	0.273
7	INCO	2016	3	0.104
8	INCO	2017	4	0.169
9	INCO	2018	4	0.403
10	INDY	2016	4	0.143
11	INDY	2017	2	0.117

12	INDY	2018	2	0.117
13	ITMG	2016	5	0.299
14	ITMG	2017	2	0.156
15	ITMG	2018	3	0.130
16	PTBA	2016	6	0.532
17	PTBA	2017	6	0.377
18	PTBA	2018	8	0.714
19	PTRO	2016	5	0.286
20	PTRO	2017	3	0.338
21	PTRO	2018	2	0.403

**Sumber: *Annual Report dan Sustainability Report***

**Data diolah Peneliti, 2019**

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan *sustainability report* pun semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.403 pada tahun 2016. Bumi Resources Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 7 (tujuh) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.558 pada tahun 2016. Vale Indonesia Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.169 pada tahun 2017. Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.143 pada tahun 2016. Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.299 pada tahun 2016. Bukit Asam Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.532 pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 8 (delapan) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.714.

Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan *sustainability report* pun kurang baik. Hal ini

ditunjukkan oleh Bumi Resources Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.208 pada tahun 2017. Vale Indonesia Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 3 (tiga) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.104 pada tahun 2016. Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 2 (dua) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.117 pada tahun 2017. Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 2 (dua) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.156 pada tahun 2017.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011), Idah (2013), dan Rosyid (2016) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **4.2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability***

##### ***Report Perusahaan Sektor Pertambangan***

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Tugas utama komite audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Untuk mengukur tingkat komite audit perusahaan, dapat dilakukan dengan menggunakan indikator ukuran komite audit. Ukuran komite audit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya jumlah

anggota komite audit dalam suatu perusahaan. Ukuran komite audit dapat diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil statistik uji t yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansi uji statistik (*p-value*) untuk variabel  $X_3$  sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05 ( $0,010 < 0,05$ ), selain itu dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,915 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,110. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,915 > 2,110$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, artinya secara parsial komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris salah satunya karena perusahaan mempunyai dampak yang luas terhadap kelestarian lingkungan (Nugroho, 2011). Lebih jelas Suryono dan Prastiwi (2011) menyatakan bahwa komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance* (GCG).

Data yang mendukung hasil penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 4.19 berikut:

**Tabel 4.19 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan**

NO	Perusahaan	Tahun	Komite Audit ( $X_3$ )	SRDI (Y)
1	ANTM	2016	5	0.403
2	ANTM	2017	5	0.455
3	ANTM	2018	4	0.416
4	BUMI	2016	6	0.558
5	BUMI	2017	4	0.208

6	BUMI	2018	2	0.273
7	INCO	2016	3	0.104
8	INCO	2017	4	0.169
9	INCO	2018	4	0.403
10	INDY	2016	4	0.143
11	INDY	2017	2	0.117
12	INDY	2018	2	0.117
13	ITMG	2016	5	0.299
14	ITMG	2017	3	0.156
15	ITMG	2018	3	0.130
16	PTBA	2016	6	0.532
17	PTBA	2017	4	0.377
18	PTBA	2018	7	0.714
19	PTRO	2016	3	0.286
20	PTRO	2017	3	0.338
21	PTRO	2018	5	0.403

**Sumber: Annual Report dan Sustainability Report**

**Data diolah Peneliti, 2019**

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan *sustainability report* pun semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.455 pada tahun 2017. Bumi Resources Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.558 pada tahun 2016. Vale Indonesia Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.403 pada tahun 2018. Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.143 pada tahun 2016. Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.299 pada tahun 2016. Bukit Asam Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.532 pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 dengan jumlah anggota komite audit sebesar 7 (tujuh)

memperoleh nilai SRDI sebesar 0.714. Petrosea Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.403 pada tahun 2018.

Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, maka pengungkapan *sustainability report* pun kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota komite audit 4 (empat) memperoleh nilai SRDI 0.416 pada tahun 2016. Bumi Resources Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.208 pada tahun 2017. Vale Indonesia Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 3 (tiga) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.104 pada tahun 2016. Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 2 (dua) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.117 pada tahun 2017. Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 3 (tiga) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.156 pada tahun 2017. Bukit Asam Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.377 pada tahun 2017. Petrosea Tbk dengan jumlah anggota komite audit sebesar 3 (tiga) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.338 pada tahun 2017.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryono dan Prastiwi (2011), Sari dan Marsono (2013), Aniktia dan Khafid (2015), serta Rosyid (2016) yang juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **4.2.3.4 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan**

Menurut Lako (2015:128), *sustainability report* merupakan model pelaporan informasi korporasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dengan pelaporan sosial (*social reporting*), pelaporan lingkungan (*environment reporting*) dan pelaporan tata kelola korporasi (*corporate governance reporting*) secara terpadu dalam satu paket pelaporan. Dalam penelitian ini, peneliti menghitung nilai *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI). Perhitungan SRDI dilakukan dengan memberikan skor 1 jika suatu item diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan. Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan.

Pratik dan pengungkapan *sustainability report* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yaitu dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Undang-Undang No. 40 tahun 2007). Dalam penelitian ini, dewan komisaris dihitung dengan menggunakan ukuran dewan komisaris, dimana ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Faktor kedua yaitu dewan direksi. Dewan direksi menurut Nadapdap (2018:109), yaitu adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan. Dalam penelitian ini, peneliti menghitung dewan direksi dengan menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan.

Faktor ketiga, yaitu faktor terakhir adalah adanya komite audit. Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012 dalam peraturan nomor IX.1.5, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam penelitian ini, komite audit dihitung dengan menggunakan ukuran komite audit, dimana ukuran komite audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil statistik uji F yang diperoleh menunjukkan nilai signifikansi uji statistik (*p-value*) untuk ketiga variabel sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), selain itu dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yang menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 12,532 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,196. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $12,532 > 3,196$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima, artinya secara simultan mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Kemampuan variabel independen menjelaskan pengungkapan *sustainability report* dengan menggunakan *R square* adalah sebesar 0,689, yang artinya sebesar 68,9% pengungkapan *sustainability report* yang diteliti dipengaruhi oleh mekanisme *good corporate governance* (GCG), sementara sebesar 31,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dihitung dalam penelitian ini.

Berpengaruhnya ketiga faktor ini secara simultan disebabkan karena pengungkapan *sustainability report* tidak terlepas dari keterlibatan mekanisme GCG (dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit). Dengan meningkatnya pengawasan dewan komisaris terkait jalannya usaha perusahaan, diterbitkannya kebijakan-kebijakan terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh dewan direksi, serta meningkatnya koordinasi komite audit dapat memperluas pengungkapan *sustainability report*. Dengan tata kelola yang baik (GCG) dalam setiap elemen perusahaan menjadi unsur komitmen dan konsistensi perusahaan untuk selalu peduli bukan hanya pada keuntungan perusahaan, namun juga bagaimana peduli kepada masyarakat dan mampu menjaga dan memelihara lingkungan, dimana informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan ini akan diungkapkan dalam *sustainability report*.

Pengungkapan *sustainability report* akan semakin luas ketika mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang terdiri dari 3 (tiga) organ, yaitu dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit secara simultan meningkat. Artinya, dengan ukuran dewan komisaris yang semakin besar, jumlah anggota dewan direksi yang semakin banyak dan ukuran komite audit yang semakin besar dalam suatu perusahaan akan dapat memperluas pengungkapan *sustainability report*.

Data yang mendukung hasil penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 4.20 berikut:

**Tabel 4.20 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Sektor Pertambangan**

NO	Perusahaan	Tahun	Dewan Komisaris (X1)	Dewan Direksi (X2)	Komite Audit (X3)	SRDI (Y)
1	ANTM	2016	6	6	5	0.403
2	BUMI		6	7	6	0.558
3	INCO		2	3	3	0.104
4	INDY		2	4	4	0.143
5	ITMG		6	5	5	0.299
6	PTBA		6	6	6	0.532
7	PTRO		5	5	3	0.286
8	ANTM	2017	8	6	5	0.455
9	BUMI		6	5	4	0.208
10	INCO		5	4	4	0.169
11	INDY		3	2	2	0.117
12	ITMG		4	2	3	0.156
13	PTBA		6	6	4	0.377
14	PTRO		5	3	3	0.338
15	ANTM	2018	6	6	4	0.416
16	BUMI		3	7	2	0.273
17	INCO		6	4	4	0.403
18	INDY		2	2	2	0.117
19	ITMG		4	3	3	0.130
20	PTBA		6	8	7	0.714
21	PTRO		6	2	5	0.403

**Sumber: *Annual Report* dan *Sustainability Report***

**Data diolah Peneliti, 2019**

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa pada saat mekanisme GCG secara simultan meningkat, maka pengungkapan *sustainability report* pun semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam), dewan direksi sebesar 6 (enam) dan komite audit sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.403, Bumi Resources Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam), dewan direksi sebesar 7 (tujuh) dan komite audit sebesar 6 (enam) memperoleh nilai

SRDI sebesar 0.558, dan Bukit Asam Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam), dewan direksi sebesar 6 (enam) dan komite audit sebesar 6 (enam) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.532 pada tahun 2016. Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 8 (delapan), dewan direksi sebesar 6 (enam) dan komite audit sebesar 5 (lima) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.455, dan Bukit Asam Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam), dewan direksi sebesar 6 (enam) dan komite audit sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.377 pada tahun 2017. Aneka Tambang Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam), dewan direksi sebesar 6 (enam) dan komite audit sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.416, dan Bukit Asam Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 6 (enam), dewan direksi sebesar 8 (delapan) dan komite audit sebesar 7 (tujuh) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.714 pada tahun 2018.

Sebaliknya, pada saat mekanisme GCG secara simultan menurun, maka pengungkapan *sustainability report* pun kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh Vale Indonesia Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 2 (dua), dewan direksi sebesar 3 (tiga) dan komite audit sebesar 3 (tiga) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.104, dan Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 2 (dua), dewan direksi sebesar 4 (empat) dan komite audit sebesar 4 (empat) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.143 pada tahun 2016. Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 3 (tiga), dewan direksi sebesar 2 (dua) dan komite audit sebesar 2 (dua) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.117, dan Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 4 (empat), dewan direksi sebesar 2 (dua) dan komite audit sebesar

3 (tiga) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.156 pada tahun 2017. Indika Energy Tbk dengan jumlah anggota dewan komisaris sebesar 2 (dua), dewan direksi sebesar 2 (dua) dan komite audit sebesar 2 (dua) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.117, dan Indo Tambangraya Megah Tbk dengan jumlah anggota dewan direksi sebesar 4 (empat), dewan direksi sebesar 3 (tiga) dan komite audit sebesar 3 (tiga) memperoleh nilai SRDI sebesar 0.130 pada tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyid (2016) yang menyatakan bahwa secara simultan *corporate governance* (dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan *sustainability report*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penemuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan atas penelitian, yaitu:

1. Mekanisme *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 mengalami fluktuasi dan terdapat perusahaan yang mekanisme GCG nya bernilai rendah.
2. Pengungkapan *Sustainability Report* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 mengalami fluktuasi dan terdapat perusahaan yang memiliki nilai SRDI terendah.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa, baik secara parsial maupun simultan mekanisme *good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar perusahaan lebih meningkatkan mekanisme GCG agar pengelolaan aktivitas perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*.
2. Disarankan agar pengungkapan *sustainability report* dilakukan secara rutin serta lengkap sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada para *stakeholder* dan kualitas *sustainability report* nya semakin baik.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan akuntansi keuangan, khususnya mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A., Lee, S. P., & Selvaraj, S. (2013), *The Influence of Governance Structure and Strategic Corporate Sosial Responsibility Toward Sustainability Reporting Quality, Business Strategy and the Environment*.
- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015), Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*, *Accounting Analysis Journal*, Vol.4, No.3, hlm. 8.
- Daniri, Mas Achmad. (2014), *Lead By GCG*, Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Cetakan ke VIII, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*, Edisi 9, Cetakan ke IX, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative*. (2013), *G4 Guidelines*.
- Hasanah, N., Syam, D., & Jati, A. W. (2015), Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan di Indonesia, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5, No.1, hlm. 4-5.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1068738/kemenaker-didesak-selidiki-kasus-pelanggaran-ham-oleh-freeport/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.
- <https://iagi.or.id/new/system/>, diunduh pada tanggal 26 November 2019.
- <https://link.springer.com/article/10.1007/s10997-010-9160-3>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-2652819/dihukum-rp-32-miliar-ini-dahsyatnya-kerusakan-lingkungan-ulah-pt-si>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.
- <https://www.antam.com/en/reports/annual-reports>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.antam.com/en/reports/csr-related-reports>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<http://www.bumiresources.com/en/investor-relations/annual-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<http://www.bumiresources.com/en/sustainability/reports>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.globalreporting.org/standards>, diunduh pada tanggal 15 November 2019.

<https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx>, diunduh pada tanggal 15 November 2019.

<https://www.indikaenergy.co.id/investors/annual-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.indikaenergy.co.id/sustainability/sustainability-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.idx.co.id/data-pasar/data-saham/daftar-saham>, diunduh pada tanggal 25 November 2019.

<https://www.itmg.co.id/investor-relation/annual-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.itmg.co.id/investor-relation/sustainability-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.komiteaudit.or.id>, diunduh pada tanggal 18 November 2019.

<https://www.mongabay.co.id/2014/01/03/pt-nusa-halmahera-mineral-dilaporkan-ke-klh-esdm-dan-komnas-ham/>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2019.

<https://www.prosesindustri.com>, diunduh pada tanggal 26 November 2019.

<http://www.ptba.co.id/en/company-report/annual-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<http://www.ptba.co.id/en/company-report/sustainability-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.petrosea.com/id/investor/laporan-tahunan>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.petrosea.com/investor/sustainability-report>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.pwc.com/id>, diunduh pada tanggal 26 November 2019.

<http://www.vale.com/indonesia/EN/investors/indonesia-investors/information-market/annual-reports/Pages/default.aspx>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<http://www.vale.com/indonesia/BH/aboutvale/sustainability/Pages/sr.aspx>, diunduh pada tanggal 6 Desember 2019.

<https://www.wbcsd.org>, diunduh pada tanggal 15 November 2019.

Idah. (2013), *Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan dalam Pengungkapan Sustainability Report*, *Accounting Analysis Journal*, Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-643/BL/2012.

Lako, A. (2015), *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nadapdap, B. (2018), *Hukum Perseroan Terbatas: Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.

Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014), Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI, *Jurnal Ekonomi*, Vol.22, No.1, hlm. 7-9.

Nugroho, M. F. F. A. (2011), Analisis Hubungan Antara Pengungkapan CSR dan Karakteristik Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Skripsi*, Undip.

- Nuryaman & Christina, V. (2015), *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- STIE EKUITAS. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Akademik 2018/2019*, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 tahun 2010.
- PSAK No.1 Revisi 2009.
- Ratnasari, Yunita. (2011), Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009.
- Rosyid, M. F. (2016), Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Sustainability Report* pada Perusahaan BUMN yang *Listed* di BEI, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2, hlm. 14.
- Rusdiyanto, dkk. (2019), *Good Corporate Governance: Teori dan Implementasinya di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sari, M. P. Y. (2013), Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report, *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyono. (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryono, H & Prastiwi, A. (2011), Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance (CG) Terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability Report (SR) (Studi Pada Perusahaan-perusahaan yang Listed (Go-Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009), *Simposium Nasional Akuntansi XIV*.

Susanto, Y. K. & Tarigan, J. (2013), Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Profitabilitas Perusahaan, *Business Accounting Review*, Vol.1, No.2, hlm.7.

Sutedi, A. (2012), *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.

Waryanto. (2010), Pengaruh Karakteristik *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Diponegoro.